

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Studi Pada Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Sabang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

DINAR SYAVIRA

NPM: 1902110051



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Sabang)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, hidayah-Nya kepada penulis hingga saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir nanti.
3. Bapak Drs. H. Tarmizi Gadeng, S.E. M.Si., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh.

4. Ibu Hj. Nadiya, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si selaku Ketua Laboratorium akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Bapak H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
8. Kak Zusmina, S.E selaku Bagian Administrasi Program Studi Akuntansi yang banyak sekali membantu, mengarahkan, memudahkan dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
9. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
10. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Parsimin, Ibunda Turminah, dan adik penulis Chori Amalia yang telah memberikan do'a, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
11. Teman-teman tersayang, Ramadhani Fitri, Kak Rauzatul Jannah, Vena Antika dan Bang Muhammad Akmal yang selalu setia menemani penulis dari awal pembuatan skripsi dan selalu mendukung serta menyemangati penulis dikala patah semangat.
12. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 02 Agustus 2023

Dinar Syavira

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.....	12
2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
2.1.3.1 Usaha Mikro.....	14
2.1.3.2 Usaha Kecil	15
2.1.3.3 Usaha Menengah	16
2.1.3.4 Ketentuan Perpajakan UMKM.....	17
2.1.4 Pengetahuan Perpajakan	18
2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan.....	18
2.1.4.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan	18
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	19
2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	19
2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	21
2.1.6.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	21
2.1.6.2 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern.....	22
2.1.6.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern	22
2.1.7 Pemeriksaan Pajak	23
2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak	23

2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak	23
2.1.7.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	25
2.1.7.4 Indikator Pemeriksaan Pajak.....	26
2.2 Penelitian Sebelumnya	26
2.3 Kerangka Pemikiran	31
2.3.1 Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.3.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
2.3.3 Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.3.4 Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
2.4 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.1.1 Tujuan Penelitian	35
3.1.2 Jenis Penelitian.....	35
3.1.3 Horizon Waktu.....	36
3.1.4 Unit Analisis	36
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	36
3.2.1 Populasi.....	36
3.2.2 Sampel Penelitian.....	36
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel	38
3.5 Teknik Analisis Data	42
3.6 Pengujian Data.....	43
3.6.1 Pengujian Instrumen	43
3.6.1.1 Uji Validitas	43
3.6.1.2 Uji Reliabilitas.....	43
3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik	44
3.6.2.1 Uji Normalitas	44
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	45
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	45
3.7 Pengujian Hipotesis	46
3.7.1 Uji Statistik t	46
3.7.2 Uji Statistik F	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar	48
4.2 Deskripsi Responden	48
4.2.1 <i>Response Rate</i>	48
4.2.2 Karakteristik Responden	49
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian	51
4.1.1 Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	52
4.1.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak	53

4.1.3	Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern	54
4.1.4	Variabel Pemeriksaan Pajak.....	56
4.1.5	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
4.4	Hasil Pengujian Data	58
4.4.1	Pengujian Instrumen	58
4.4.1.1	Uji Validitas	58
4.4.1.2	Uji Reliabilitas.....	60
4.4.2	Pengujian Asumsi Klasik	61
4.4.2.1	Uji Normalitas	61
4.4.2.2	Uji Multikolinearitas	62
4.4.2.3	Uji Heterokedastisitas	63
4.4.3	Model Regresi dan Uji Hipotesis	65
4.4.3.1	Hasil Regresi	66
4.4.3.2	Uji Parsial (Uji t).....	68
4.4.3.3	Uji Simultan (Uji F)	70
4.4.3.4	<i>R-Square</i> (Koefisien Determinasi)	71
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
4.5.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	72
4.5.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	73
4.5.3	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	74
4.5.4	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	74
4.5.5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Sabang	5
Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 3.1	Skala <i>Likert</i>	38
Tabel 3.2	Definisi Operasional dan Indikator	40
Tabel 4.1	Perincian <i>Response Rate</i> Terhadap Kuesioner.....	48
Tabel 4.2	Identitas Responden	49
Tabel 4.3	Kriteria Rata-rata Skor Tanggapan Responden	52
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan.....	52
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak.....	53
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern	55
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak.....	56
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	57
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Instrumen	59
Tabel 4.10	Uji Reliabilitas	60
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.13	Hasil Uji Heterokedastisitas	65
Tabel 4.14	Hasil Regresi Linear Bergada	66
Tabel 4.15	Uji Parsial (Uji t).....	68
Tabel 4.16	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	71
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	82
Lampiran 2 Master Tabel	89
Lampiran 3 R Tabel	97
Lampiran 4 T Tabel.....	98
Lampiran 5 F Tabel.....	103
Lampiran 6 <i>Output SPSS</i>	112

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(STUDI PADA WAJIB PAJAK UMKM WILAYAH KOTA SABANG)**

**DINAR SYAVIRA
1902110051**

Pembimbing : 1.) H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak, CA
2.) Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Sabang. Faktor-faktor yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak. Metode yang digunakan merupakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pemilik UMKM di Kota Sabang yang terdaftar di KPP Pratama Aceh Besar dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, dan Kota Sabang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* sebanyak 90 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas) dan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas). Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil pengujian simultan, semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE
UMKM TAXPAYER COMPLIANCE WITH THE IMPLEMENTATION OF
TAX OBLIGATIONS
(STUDIES ON UMKM TAXPAYERS IN THE CITY OF SABANG)**

**DINAR SYAVIRA
1902110051**

Adviser : 1.) H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak, CA
2.) Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine factors that affect taxpayer compliance on micro, small, and medium enterprises (UMKMs) in the city of Sabang. The factors consist of taxation, awareness of taxpayers, modern tax administration systems, and tax examination. The method used is a quantitative research design. The data used in this study are primary data. Primary data were obtained through the distribution of questionnaires to owners of UMKMs in the city of Sabang who are registered with the Aceh Besar Primary Tax Office and operate within the Aceh Besar District, Aceh Pidie District, and Sabang City. The sample in this study consists of 90 randomly selected respondents using random sampling technique. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The data testing conducted in this study includes instrument testing (validity test and reliability test) and classical assumption testing (normality test, multicollinearity test, and heteroskedasticity test). For hypothesis testing, the researcher used the F-test and t-test. The results of this study partially indicate that each variable such as taxation knowledge, taxpayer awareness, modern tax administration system, and tax examination have a significant influence on taxpayer compliance. Meanwhile, the simultaneous testing results show that all variables have a significant influence on taxpayer compliance.

Keywords : Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Modern Tax Administration System, Tax Examination, UMKM Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pendanaan pembangunan dalam negeri. Tingkatan pajak menentukan kemampuan anggaran negara untuk mendanai pengeluaran negara, baik dana pembangunan maupun dana anggaran rutin. Walaupun pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, namun penerimaan pajak masih rendah. Meskipun kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diperkirakan akan meningkat dari tahun ke tahun, pada kenyataannya penerimaan pajak belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak ikut berkontribusi dalam memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, karena ketika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM telah menjadi penggiat ekonomi yang handal, tangguh, mampu tumbuh dan beradaptasi dengan cepat. UMKM dapat menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar yaitu mencapai 97 persen dari total 64 juta UMKM di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM "Peran UMKM sangat penting namun sektor perpajakan UMKM perlu terus ditingkatkan karena data perpajakan Wajib Pajak dari UMKM masih kecil". Wajib Pajak dari UMKM harus ditingkatkan karena sebenarnya sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) Indonesia yakni mencapai 60 persen. Disisi lain, melalui kontribusi UMKM sebanyak 60 persen terhadap PDB dalam penerimaan PPH Final UMKM pada tahun 2014 baru sekitar Rp 2 triliun. (Antaranews.com 2021)

Faktor kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah tingkat pengetahuan perpajakan yang membuat pajak menjadi rumit bagi sebagian orang. Wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak, khususnya pajak untuk membiayai pembangunan pemerintah. Selain itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang baik diharapkan dapat menambah kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Faktor kepatuhan wajib pajak yang kedua adalah kesadaran wajib pajak, jika pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak sudah baik, maka hal ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sofianti dan Wahyudi (2022:182)

Faktor kepatuhan wajib pajak yang ketiga adalah sistem administrasi perpajakan modern, sistem administrasi perpajakan yang efektif yaitu dapat mencapai target penerimaan pajak secara tepat sasaran, memberikan efek jera terhadap pelanggaran perpajakan. Sistem administrasi perpajakan yang efektif juga didukung oleh otoritas pajak yang efektif, staf pajak yang kompeten, dan prosedur perpajakan yang baik. Perubahan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan sangat penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Seorang petugas pajak yang berkualitas dapat memberikan pelayanan pajak dan menjadi pengawas penegakan pajak bagi wajib pajak. Suatu bagian yang tidak terpisahkan, prosedur dan sistem informasi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada tahun 2005, DJP menciptakan beberapa sistem administrasi perpajakan seperti *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing* dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan *e-System (Electronic System)*. Modernisasi teknologi ini dapat diandalkan sebagai salah satu pilar utama reformasi perpajakan, karena akan berguna sebagai usaha dalam menghindari penggelapan pajak, meningkatkan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Duwiri, *et al* (2020:21)

Faktor kepatuhan wajib pajak yang keempat adalah pemeriksaan pajak. Adanya *Self Assessment System* mengharuskan DJP untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan perpajakan terhadap Wajib Pajak. Dikarenakan Wajib Pajak saat ini dapat menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak. Pemeriksaan pajak menjadi salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Duwiri, *et al* (2020:21). Pemeriksaan pajak merupakan salah satu elemen kunci bagi wajib pajak untuk membangun kepercayaan wajib pajak agar tetap taat pada kepatuhan perpajakan. Hal ini menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan pemeriksaan pajak yang lebih adil, profesional dan akuntabel. Menyempurnakan kebijakan pemeriksaan pajak sebagai bentuk reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penerapan kepastian hukum dan aspek keadilan bagi wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak. Dari beberapa penelitian sebelumnya terhadap faktor-faktor kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil dengan beragam variasi. Meskipun sebagian penelitian menunjukkan hasil yang konsisten, namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Adapun penelitian oleh Sofianti dan Wahyudi (2022) memperoleh hasil pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, *et al* (2022), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penelitian Sarasawati, *et al* (2018) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Duwiri, *et al* (2020) memiliki hasil sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada penelitian Lesmana dan Setyadi (2020) memiliki hasil pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah tabel kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Sabang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Sabang

No	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (%)
1	2019	2.315	349	268	76,8%
2	2020	5.293	550	232	42,2%
3	2021	6.205	735	498	67,8%

Sumber: KPP Pratama Aceh Besar (2022)

Data pada tabel 1.1 merupakan data Kota Sabang yang diperoleh dari KPP Pratama Aceh Besar. KPP Pratama Aceh Besar melayani wajib pajak dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, dan Kota Sabang. Berdasarkan jumlah wajib pajak UMKM Kota Sabang yang terdaftar, potensi penerimaan pajak UMKM masih dapat ditingkatkan karena belum keseluruhan UMKM di Kota Sabang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM. Dapat terlihat jumlah wajib pajak UMKM di Kota Sabang yang terdaftar di KPP Pratama Aceh Besar meningkat setiap tahunnya. Sedangkan jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan pada tahun 2020 berjumlah 232 wajib pajak dengan persentase 42,2%, yang mana sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah 268 wajib pajak dengan persentase 76,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa umumnya UMKM yang ada di Kota Sabang tidak patuh.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak seperti pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Faktor eksternal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seperti sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dipaparkan oleh penelitian terdahulu dengan hasil yang masih belum konsisten. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Sabang)”. Penelitian ini dikhususkan bagi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Sabang.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
5. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
5. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah terhadap penelitian di bidang akuntansi, terutama pada bidang perpajakan UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi perkembangan informasi untuk aparat pajak terkait Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Bagi Wajib Pajak terutama Wajib Pajak UMKM serta masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan sumber informasi mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Aceh Besar, khususnya wilayah Kota Sabang pada tahun 2021.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider (1958) adalah peneliti pertama yang mengenalkan teori atribusi (*attribution theory*). Melalui teori atribusinya, Heider mencoba untuk menekankan bahwa mempelajari atribusi sangatlah penting karena atribusi memberikan pengaruh pada apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan oleh manusia. Sumartik (2018:104). Heider (dalam Sumartik, 2018:104) menemukan penyebab khusus dari sebuah perilaku dalam dua kategori, yaitu:

1. Atribusi Internal

Hal-hal yang berasal dari orang yang bersangkutan seperti suasana hati, kepribadian, kemampuan, kondisi keuangan, atau keinginan.

2. Atribusi Eksternal

Hal-hal yang berasal dari lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan seperti tekanan dari luar, ancaman, keadaan cuaca, kondisi perekonomian atau pun pengaruh lingkungan.

Dalam kepatuhan wajib pajak, penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri dapat dipengaruhi oleh persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan. Teori atribusi dapat dijadikan sebagai teori dasar yang relevan untuk dapat menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dihubungkan dengan sikap seorang wajib pajak untuk memberikan penilaian sendiri terhadap pajak itu sendiri. Nugraheni dan Purwanto (2015)

Pengetahuan perpajakan berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang mengetahui tentang fungsi pajak, maka wajib pajak mau membayar kewajiban perpajakannya karena wajib pajak merasakan ada timbal balik yang dihasilkan dari pembayaran pajak itu sendiri. Namun, apabila pengetahuan terkait fungsi pajak yang kurang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Prakoso, *et al* (2019)

Kesadaran wajib pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dewi dan Susanto (2021)

Sistem administrasi perpajakan modern berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini karena kurangnya pemerintah didalam memberikan informasi mengenai modernisasi sistem kepada wajib pajak. Wajib pajak yang dapat beradaptasi dengan menggunakan modernisasi sistem diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak dapat beradaptasi akan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hapsari dan Kholis (2020)

Pemeriksaan pajak berdasarkan teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan. Pemeriksaan terhadap sistem atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan semula sehingga menghasilkan efektifitas dan hasil yang maksimal. Mahendra, *et al* (2022)

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Rahayu (2020:189). Kepatuhan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Kepatuhan formal mencakup hal:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP),
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang,
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

Kepatuhan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Menurut Rahayu (2017:194), wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara.
Sistem administrasi perpajakan yang efektif yaitu sistem administrasi perpajakan yang dapat mencapai tujuan penerimaan pajak sesuai dengan target, memberikan *deterrence effect* pelanggaran kewajiban perpajakan.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
Pelayanan administrasi perpajakan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan terpenting dalam suatu Negara yang ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
3. Kualitas penegakan hukum perpajakan.
Penegakan hukum perpajakan dilakukan dengan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak. Pemberian sanksi ini dilakukan apabila diketahui Wajib Pajak melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi.
4. Kualitas pemeriksaan pajak.
Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas dapat dilihat dari proses pemeriksaan pajak dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Proses pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan

pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan pemeriksa pajak memenuhi norma pemeriksaan pajak.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.
Tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang Perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan, agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dirasa memberatkan.
6. Kesadaran Wajib Pajak.
Kesadaran Wajib Pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak.
7. Pemahaman Wajib Pajak.
Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut.
8. Perilaku Wajib Pajak.
Perilaku Wajib Pajak menunjukkan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap dapat diterima oleh Wajib Pajak.

2.1.2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006:84) ada beberapa indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.
3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat melalui *e-payment*.

4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.3.1 Usaha Mikro

Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun (2008) adalah:

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Hasanah, *et al* (2020:15) Ciri-ciri usaha mikro:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap. Jenis barang yang dijual dapat diganti sewaktu-waktu usaha tersebut membutuhkan pergantian;
- b. Dapat berpindah tempat sewaktu-waktu atau tempat usahanya tidak selalu menetap;
- c. Umumnya, usaha mikro belum melakukan administrasi yang sederhana sekalipun. Usaha mikro tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keluarga usaha;
- d. Pemilik usaha mikro cenderung belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Memiliki tingkat pendidikan yang relatif sangat rendah sebagai pemilik usaha;
- f. Sebagian dari pemilik mikro usaha sudah mengakses lembaga keuangan Non Bank, tetapi belum memiliki akses perbankan;
- g. Cenderung tidak memiliki izin terkait pendirian usaha atau persyaratan legalitas lainnya.

Contoh usaha mikro:

- a. Usaha katering rumahan;
- b. *Laundry*;
- c. Kerajinan souvenir;
- d. Toko kelontong;
- e. Warmino;
- f. Peternakan;
- g. Tour dan travel;

- h. Jajanan rumahan.

2.1.3.2 Usaha Kecil

Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun (2008) adalah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Kriteria usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Hasanah, *et al* (2020:16) ciri-ciri usaha kecil:

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

Contoh usaha kecil:

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
- e. Koperasi berskala kecil.

2.1.3.3 Usaha Menengah

Usaha menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun (2008) adalah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria usaha menengah yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Hasanah, *et al* (2020:18) ciri-ciri usaha menengah:

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, dan pemeliharaan kesehatan;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah:

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

- a. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
- b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
- c. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar propinsi;
- d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
- e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

2.1.3.4 Ketentuan Perpajakan UMKM

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Tujuan dibuatnya Kebijakan Perpajakan ini adalah agar Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu agar dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan ketentuan umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rahayu (2020:522). Secara khusus Peraturan Pemerintah ini memberikan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu.
2. Memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Tarif PPH yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final.

Tarif PPH Final 0,5% hanya berlaku bagi UMKM yang memiliki Peredaran Bruto (omzet) tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Usaha tersebut antara lain adalah usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Tarif PPH final berlaku untuk UMKM konvensional

atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial). Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Tarif Final berdasarkan Peraturan Pemerintah adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas.

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak untuk mendefinisikan, merumuskan, dan menginterpretasikan peraturan perpajakan, serta mampu melihat akibat atau implikasi dari kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam pengetahuan tersebut. Pengetahuan merupakan domain sangat penting dalam membentuk Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan. Rahayu (2020:197). Pengetahuan Wajib Pajak dapat digolongkan berdasarkan tingkat pengetahuan menjadi:

1. Kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan,
2. Kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi satu pemahaman utuh,
3. Kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan, berikut implikasi yang ditimbulkannya.

2.1.4.2 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:
 - a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
 - b. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak. Kesadaran ini timbul dari kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Rahayu (2020:196). Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan,

2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya,
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan Kepatuhan Pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan Kepatuhan Pajak, dapat pula menumbuhkan sikap kritis Wajib Pajak dalam menyikapi masalah perpajakan. Masalah tersebut seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah didalam memenuhi tujuan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dapat dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak yaitu: sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu Wajib Pajak, tingkat pengetahuan Wajib Pajak, tingkat ekonomi Wajib Pajak, dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Sedangkan faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah prasangka negatif kepada Fiskus, *barrier* dari instansi diluar pajak, informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi, wujud pembangunan dirasa kurang, dan adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari: Target penerimaan pajak tercapai, tingkat kepatuhan pajak tinggi, *Tax Ratio* tinggi, jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif, jumlah tagihan pajak rendah, dan tingkat pelanggaran rendah. Rahayu (2017:191).

2.1.5.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Irianto (2011:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak mendorong wajib pajak, diantaranya :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap negara.

2.1.6 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.1.6.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Anggraeni, *et al* (2019). Sistem Administrasi Perpajakan Modern merupakan bagian dari Reformasi Perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan. Sehingga dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini dapat tercapai implementasi atas Sistem Administrasi Perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.

2.1.6.2 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Modernisasi Sistem Perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good Governance*, merupakan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan TIK yang andal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Rahayu (2020:119)

2.1.6.3 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Rahayu (2017:120) Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. Restrukturisasi organisasi
Restrukturisasi organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan. Fleksibilitas struktur organisasi juga harus diciptakan agar dapat menyesuaikan perubahan lingkungan yang sangat dinamis mencakup perkembangan bisnis dan teknologi Informasi Komunikasi.
2. Penyempurnaan proses bisnis memanfaatkan sumber teknologi dan informasi
Penyempurnaan *business process* dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
Dengan sistem dan manajemen sumber daya manusia lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

2.1.7.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember (2007) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* adalah bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan perpajakan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan penghindaran pajak, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Harjo (2019:237).

2.1.7.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketentuan lain. Rahayu (2017:358).

1. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:
 - a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
 - b. SPT rugi;
 - c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian NPWP secara jabatan;
 - b. Penghapusan NPWP;
 - c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan;
 - e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
- k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

2.1.7.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan adalah ruang lingkup jenis pajak yang diperiksa dan jangka waktu pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan meliputi pemeriksaan terhadap satu atau beberapa jenis pajak, meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, satu bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik yang lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan semua jenis pajak (*all taxes*) meliputi semua jenis pajak untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak, baik tahun lalu maupun tahun berjalan. Rahayu (2020:408)

Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember (2008) tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, yaitu:

1. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan lapangan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan

(SP2) sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jangka waktu pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor dihitung sejak tanggal Wajib Pajak harus datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.

2.1.7.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Saad (2017), terdapat indikator dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu :

1. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
2. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT
3. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar
4. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). Sofianti dan Wahyudi (2022)	• Kuantitatif • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak untuk UMKM di Kabupaten Demak berpengaruh signifikan. Namun kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	• Pengetahuan perpajakan • Kesadaran wajib pajak	• Sanksi perpajakan • Pelayanan fiskus • Tempat penelitian • Waktu penelitian
2.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Mahendra, <i>et al</i> (2022)	• Kuantitatif • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, sistem perpajakan, dan sikap wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak untuk para pelaku UMKM di	• Pengetahuan perpajakan • Kesadaran wajib pajak • Pemeriksaan pajak	• Sistem perpajakan • Sikap wajib pajak • Insentif pajak • Pelayanan pajak • Denda dan sanksi pajak • Tempat penelitian

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Sebelumnya**

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Kota Surakarta pada masa pandemi berpengaruh secara signifikan. Namun pada variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, insentif pajak, denda dan sanksi pajak, serta pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.		• Waktu penelitian
3.	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. Duwiri, <i>et al</i> (2020)	• Kuantitatif • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di	• Sistem administrasi perpajakan modern • Kualitas pemeriksaan pajak • Kesadaran masyarakat	• Tempat penelitian • Waktu penelitian

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Kota Jayapura. Namun kesadaran masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.		
4.	Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Lesmana dan Setyadi (2020)	• Kuantitatif • Persamaan struktural	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi dan moral etika berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib UMKM. Namun pemeriksaan pajak dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	• Pemeriksaan pajak • Pengetahuan wajib pajak	• Sanksi • Moral etika • Tempat penelitian • Waktu penelitian
5.	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan	• Kuantitatif • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara	• Kesadaran wajib pajak • Sistem administrasi pajak modern	• Sanksi pajak • Tempat penelitian • Waktu penelitian

**Tabel 2.1 (Lanjutan)
Penelitian Sebelumnya**

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. Sarasawati, <i>et al</i> (2018)		signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Namun sanksi pajak dan sistem administrasi pajak modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.		
6.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Khasanah dan Yushita (2016)	• Kausal komparatif • Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.	• Pengetahuan perpajakan • Modernisasi sistem administrasi perpajakan • Kesadaran wajib pajak	• Tempat penelitian • Waktu penelitian

Sumber: Berdasarkan kumpulan jurnal di Bab 2

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak yang dimaksud adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, tata cara penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Pengetahuan perpajakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Sehingga, tingkat penerimaan pajak juga akan meningkat. Masyarakat yang berpendidikan dan sadar akan kegunaan dan manfaat pajak itu sendiri, akan merasa patuh untuk melaporkan pajaknya. Ketika mereka dapat menerapkan tata cara pembayaran pajak dengan baik, maka perekonomian negara akan berjalan dengan baik dan secara tidak langsung mereka akan merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri. Nugroho dan Zulaikha (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Sofianti dan Wahyudi (2022) menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin banyak pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

2.3.2 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dengan kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak merupakan kewajiban bagi Warga Negara Indonesia dalam rangka membangun negara. Dengan kata lain, wajib pajak yang memahami peran

pajak yang sebenarnya bagi perekonomian negara akan berusaha mematuhi pajak dengan cara membayar pajak tepat waktu. Ermawati (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Sarasawati, *et al* (2018) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin banyak kesadaran wajib pajak mengetahui atau mengerti tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

2.3.3 Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak

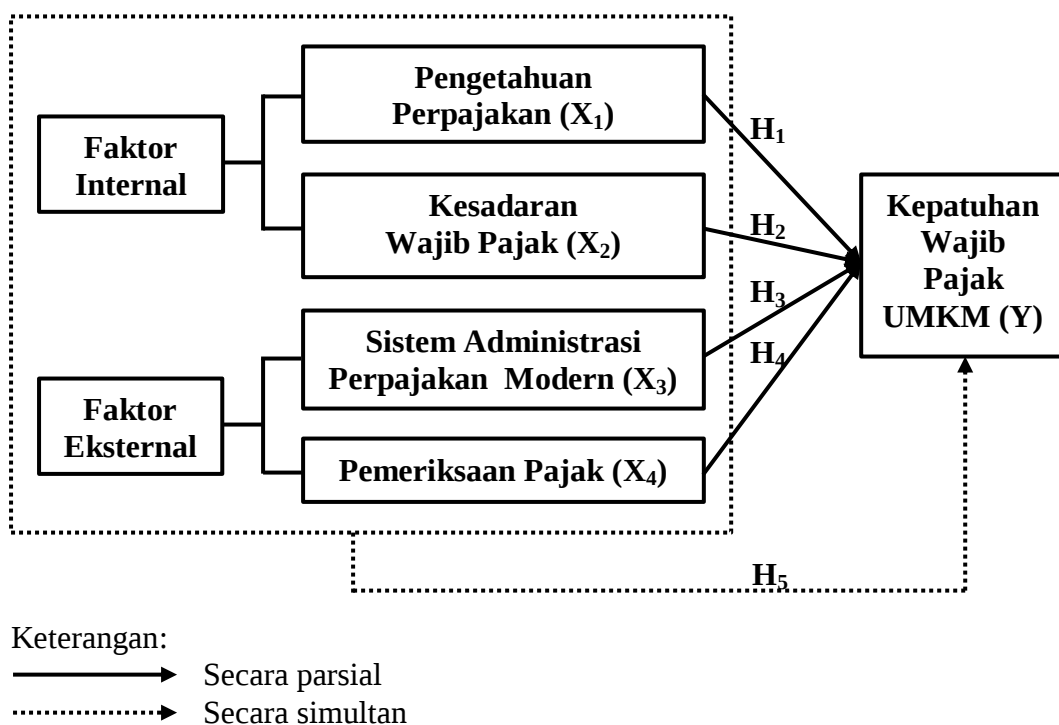
Hal mendasar dalam sistem administrasi perpajakan modern adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), serta perubahan paradigma perpajakan. Pada prinsipnya perubahan yang terjadi dalam sistem administrasi perpajakan dapat mengubah cara berpikir dan juga perilaku aparatur pajak serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan menjadikan DJP sebagai institusi profesional dengan citra yang baik di masyarakat. Sofiyana, *et al* (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Duwiri, *et al* (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya modernisasi sistem pajak ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

2.3.4 Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, *et al* (2022) dan Duwiri, *et al* (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemeriksaan pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis,

karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Noor (2011:79) Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- H₃ : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- H₄ : Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- H₅ : Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Siyoto dan Sodik (2015:82)

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Sabang).

3.1.2 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan termasuk kedalam pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Jenis penelitian ini adalah bersifat asosiatif kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat berupa variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi). Wijayanti, *et al* (2021:33)

3.1.3 Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot study* yaitu data penelitian yang dapat dikumpulkan sekaligus dari subjek penelitian pada periode tertentu dalam satu titik waktu. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk kepada kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah seluruh data penting mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian. Siyoto dan Sodik (2015:55). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Sabang pada tahun 2021 sebanyak 498 wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Aceh Besar.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di

populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Siyoto dan Sodik (2015:55). Dikutip dari Priyono (2008:120) dari berbagai rumus yang ada, ada sebuah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besaran sampel, yaitu rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{498}{1 + (498) (0,1)^2}$$

$$n = \frac{498}{1 + 4,98}$$

$$n = \frac{498}{5,98}$$

$$n = 83,27 \text{ dibulatkan menjadi } 83 \text{ orang}$$

Dimana:

n = Besaran sampel

N = Besaran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel sebesar 10%

Namun untuk mengantisipasi kuesioner tidak kembali atau rusak maka peneliti mengedarkan kuesioner sebanyak 90 kuesioner.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen grafis (tabel, catatan, dan notulen rapat), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Sugiyono (2013:93). Penggunaan skala *likert* ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala *Likert*

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber: Sugiyono (2013)

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disusun. Kuesioner diharapkan dapat dikembalikan kepada peneliti, dalam waktu yang telah ditentukan.

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai "variasi" antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Sugiyono (2013:38). Sedangkan operasional didefinisikan gambaran teliti mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis kedalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Priyono (2008:58). Penelitian ini terbagi menjadi dua variabel, antara lain:

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus/topik penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
2. Variabel Bebas (Variabel Independen) adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_3), Pemeriksaan Pajak (X_4).

Definisi operasional dari variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, tata cara penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dengan kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban.

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_3)

Sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan

pajak. Sehingga dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ini dapat tercapai implementasi atas Sistem Administrasi Perpajakan yang lebih sempurna dari sebelumnya dan lebih stabil sebagai salah satu pilar kokoh fundamental pencapaian penerimaan pajak.

4. Pemeriksaan Pajak (X_4)

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan meliputi kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Untuk lebih mudah, berikut disajikan definisi operasional dan indikator dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Nomor Item	Skala
Pengetahuan perpajakan (X_1)	Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, tata cara penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. (Nugroho dan Zulaikha, 2012)	a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Rahayu, 2010)	a. 1, 2, 3 b. 4,5 c. 6, 7	Skala <i>Likert</i> 1-5

Tabel 3.3 (Lanjutan)
Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Nomor Item	Skala
Kesadaran wajib pajak (X_2)	Sikap wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan dengan kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban. (Ermawati, 2018)	a. Kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan negara b. Kesadaran menunda dan mengurangi pembayaran merugikan negara c. Kesadaran pajak dapat dipaksakan (Irianto, 2011)	a. 1 b. 2 c. 3, 4, 5	Skala <i>Likert</i> 1-5
Sistem administrasi perpajakan modern (X_3)	Sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuan untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. (Anggraeni <i>et al</i> , 2014)	a. Restrukturisasi organisasi b. Penyempurnaan proses bisnis memanfaatkan sumber teknologi dan informasi c. Penyempurnaan proses manajemen sumber daya manusia d. <i>Good governance</i> (Rahayu, 2017)	a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 7, 8, 9 d. 10, 11	Skala <i>Likert</i> 1-5
Pemeriksaan pajak (X_4)	Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk	a. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak b. Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaikan SPT c. Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar	a. 1, 2 b. 3, 4 c. 5, 6	Skala <i>Likert</i> 1-5

Tabel 3.3 (Lanjutan)
Definisi Operasional dan Indikator

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Nomor Item	Skala
	menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2009)	d. Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan (Saad, 2017)	d. 7,8	
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Devano dan Rahayu, 2006)	a. Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak b. Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak c. Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak d. Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak (Devano dan Rahayu, 2006)	a. 1, 2 b. 3, 4 c. 5, 6, 7, 8 d. 9, 10	Skala <i>Likert</i> 1-5

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda. Persamaan yang dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak

α : Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$: Koefisien Regresi

X_1 : Variabel Pengetahuan Perpajakan

X_2 : Variabel Kesadaran Wajib Pajak

X_3 : Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

X_4 : Variabel Pemeriksaan Pajak

e : Error term

3.6 Pengujian Data

Untuk menentukan valid atau tidaknya antara data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden, maka sebelum data diolah untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian instrumen dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

3.6.1 Pengujian Instrumen

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid. Valid berarti *instrument* tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang dipergunakan untuk uji validitas dilakukan dengan korelasi *product-moment Pearson*. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti item tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti dinyatakan item tersebut dinyatakan tidak valid. Ghazali (2016:52)

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabel menunjukan pada suatu

pengertian bahwa suatu *instrument* cukup dengan dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena *instrument* tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Ghazali (2016:47)

Setelah instrumen penelitian tersusun serta diuji validitas dan reliabilitasnya, langkah selanjutnya adalah penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: penyerahan kuesioner secara langsung tatap muka, melalui surat, dan melalui email. Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016:97)

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi suatu masalah. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat dari hasil *Kolmogorov-Smirnov*. Dikatakan memenuhi normalitas jika nilai residual yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Ghazali (2016:154)

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $< 0,01$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$. Ghazali (2016:103)

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam uji model regresi. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *scatter plot* dan *glejser*. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Ghazali (2016:134). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Untuk menilai uji secara statistik menggunakan uji *glejser* kriterianya adalah dengan melihat nilai signifikansi sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengandung adanya heteroskedastisitas,
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

3.7.1 Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 Ghozali (2009:84). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel

Jika nilai t hitung $>$ nilai t tabel maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Jika nilai t hitung $<$ nilai t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Berdasarkan nilai signifikansi pada *output SPSS*

Jika nilai signifikan < 0.05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan > 0.05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.2 Uji Statistik F

Uji Statistitk F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statisitik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 Ghozali (2009:84). Dasar pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh H. M. Daud Beureueh No.53, Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. KPP Pratama Aceh Besar melayani wajib pajak dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, dan Kota Sabang.

4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 *Response Rate*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperoleh gambaran bahwa dari 90 kuesioner yang disebarkan kepada responden, semua kuesioner layak untuk dianalisis (*Response Rate*) yaitu sebanyak 90 kuesioner (100%).

Tabel 4.1
Perincian *Response Rate* Terhadap Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Dalam (%)
1	Kuesioner yang disebar	90	100
2	Kuesioner yang tidak kembali	-	-
3	Kuesioner yang tidak layak untuk dianalisis	-	-
4	<i>Response Rate</i>	90	100

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2023

4.2.2 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini, identitas (data diri) responden digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui karakteristik-karakteristik data dari responden. Penggolongan yang dilakukan kepada responden adalah berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis usaha dan lama usaha, sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai identitas diri responden. Hasil pengelompokkan data diri responden pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Identitas Responden

Uraian	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	45	50,0
Perempuan	45	50,0
Total	90	100,0
Usia		
< 21 Tahun	9	10,0
21-30 Tahun	32	35,6
31-40 Tahun	21	23,3
41-50 Tahun	16	17,8
> 50 Tahun	12	13,3
Total	90	100,0
Pendidikan Terakhir		
SMP	5	5,6
SMA	45	50,0
D3	14	15,6
S1	26	28,9
Total	90	100,0
Jenis Usaha		
Industri	3	3,3
Jasa	16	17,8
Kuliner	20	22,2
Perdagangan	36	40,0
Perikanan	4	4,4
Pertanian	2	2,2
Peternakan	1	1,1
Lainnya	8	8,9
Total	90	100,0
Lama Usaha		
< 2 Tahun	21	23,3
2-4 Tahun	23	25,6

Uraian	Frekuensi	Persentase
4-6 Tahun	12	13,3
6-8 Tahun	8	8,9
> 8 Tahun	26	28,9
Total	90	100,0

Sumber: Hasil olah data peneliti, 2023

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 90 orang responden, jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 45 orang (50%), di mana hasil ini menunjukkan bahwa sama dengan responden perempuan yaitu sebanyak 45 orang (50%).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 90 orang responden, jumlah responden yang berusia kurang dari 21 tahun sebanyak 9 orang (10%), sementara responden dengan usia antara 21-30 tahun adalah sebanyak 32 orang (35,6%), responden dengan rentang usia antara 31-40 tahun sebanyak 21 orang (23,3%), responden dengan rentang usia antara 41-50 tahun sebanyak 16 orang (17,8%), dan responden dengan usia lebih dari 50 tahun adalah sebanyak 12 orang atau sebesar 13,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia antara 21-30 tahun yaitu sebanyak (35,6%).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir responden dalam penelitian ini adalah mayoritas responden adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 45 orang (50%), kemudian diurutkan kedua adalah responden yang berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 26 orang (28,9%), diurutkan ketiga responden berpendidikan terakhir D3 yaitu sebanyak 14 orang (15,6%), diurutkan keempat atau terakhir yaitu responden yang berpendidikan terakhir SMP yaitu 5 orang (5,6%).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jenis usaha responden dalam penelitian ini adalah mayoritas responden adalah perdagangan yaitu sebanyak 36 orang (40%), selanjutnya diurutkan kedua adalah yang berupa jenis usaha kuliner yaitu sebanyak 20 orang (22,2%), kemudian responden paling banyak urutan ketiga adalah yang berupa jenis usaha jasa yaitu sebanyak 16 orang (17,8%), kemudian diurutkan keempat adalah yang berupa jenis usaha lainnya di luar yang disajikan dalam tabel yaitu sebanyak 8 orang (8,9%), selanjutnya diurutkan kelima adalah yang berupa jenis usaha perikanan yaitu sebanyak 4 orang (4,4%), kemudian responden paling banyak urutan keenam adalah yang berupa jenis usaha industri yaitu sebanyak 3 orang (3,3%), diurutkan ketujuh adalah yang berupa jenis usaha pertanian yaitu sebanyak 2 orang (2,2%), dan yang terakhir atau paling sedikit adalah yang berupa jenis usaha peternakan yaitu hanya 1 orang (1,1%).

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 90 orang responden, jumlah responden yang memiliki lama usaha kurang dari 2 tahun sebanyak 21 orang (23,3%), sementara responden dengan lama usaha 2-4 tahun sebanyak 23 orang (25,6%), responden dengan lama usaha 4-6 tahun sebanyak 12 orang (13,3%), responden dengan lama usaha 6-8 tahun sebanyak 8 orang (8,9%), dan responden dengan lama usaha lebih dari 8 tahun sebanyak 26 orang (28,9%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan lama usaha lebih dari 8 tahun yaitu sebanyak 26 orang (28,9%).

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap masing-masing item pertanyaan yang dikategorikan menjadi 5

kategori: sangat tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik dan sangat baik dengan rentang kategori sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kriteria Rata-rata Skor Tanggapan Responden

Persentase	Kategori Persentase
0% - 19,9%	Sangat Tidak Baik
20% - 39,9%	Tidak Baik
40% - 59,9%	Cukup Baik
60% - 79,9%	Baik
80% - 100%	Sangat Baik

Berikut ini akan dijelaskan akumulasi tanggapan responden atas masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

4.1.1 Variabel Pengetahuan Perpajakan

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab “5” terhadap pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan perpajakan. Dari 90 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh jawaban mengenai pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan

Kode Item	Pengetahuan Perpajakan					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
X1.1	41	36	10	2	1	90	450	85,3%	Sangat Baik
	205	144	30	4	1	384			
X1.2	65	14	7	2	2	90	450	90,7%	Sangat Baik
	325	56	21	4	2	408			
X1.3	64	16	9	0	1	90	450	91,6%	Sangat Baik
	320	64	27	0	1	412			
X1.4	47	32	10	0	1	90	450	87,6%	Sangat Baik
	235	128	30	0	1	394			
X1.5	59	26	4	0	1	90	450	91,6%	Sangat Baik
	295	104	12	0	1	412			
X1.6	47	30	12	1	0	90	450	87,3%	Sangat Baik
	235	120	36	2	0	393			
X1.7	38	36	15	0	1	90	450	84,4%	Sangat Baik
	190	144	45	0	1	380			

Kode Item	Pengetahuan Perpajakan					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
Skor Aktual Pengetahuan Perpajakan						2783		88,3%	Sangat Baik
Skor Ideal Pengetahuan Perpajakan						3150			

Sumber: Hasil olah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 tanggapan responden terhadap 7 pernyataan variabel pengetahuan perpajakan dapat diketahui bahwa nilai skor aktual tertinggi adalah sebesar 412 dengan persentase 91,6% yaitu pada pernyataan dengan kode “X1.3 dan X1.5” yang termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan nilai skor aktual dan persentase terendah yaitu pada pernyataan dengan kode “X1.7” yaitu sebesar 380 atau dengan persentase sebesar 84,4% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara untuk nilai keseluruhan skor aktual dan persentase jawaban responden variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 2783 (88,3%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa merasa pengetahuan perpajakan yang sangat baik pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang.

4.1.2 Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab “5” terhadap pernyataan-pernyataan tentang kesadaran wajib pajak. Dari 90 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh jawaban mengenai kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

Kode Item	Kesadaran Wajib Pajak					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
X2.1	21	60	7	0	2	90	450	81,8%	Sangat Baik
	105	240	21	0	2	368			
X2.2	21	56	10	1	2	90	450	80,7%	Sangat

Kode Item	Kesadaran Wajib Pajak					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
		105	224	30	2	2	363		
X2.3	39	35	13	2	1	90	450	84,2%	Sangat Baik
	195	140	39	4	1	379			
X2.4	53	26	7	2	2	90	450	88,0%	Sangat Baik
	265	104	21	4	2	396			
X2.5	39	35	14	0	2	90	450	84,2%	Sangat Baik
	195	140	42	0	2	379			
Skor Aktual Kesadaran Wajib Pajak						1885		83,8%	Sangat Baik
Skor Ideal Kesadaran Wajib Pajak						2250			

Sumber: Hasil olah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 tanggapan responden yang diperoleh dari 5 pernyataan di atas mengenai variabel kesadaran wajib dapat diketahui bahwa nilai skor aktual tertinggi adalah sebesar 396 dengan persentase 88% yaitu pada pernyataan dengan kode “X2.4” yang termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan nilai skor aktual dan persentase terendah yaitu pada pernyataan dengan kode “X2.2” yaitu sebesar 363 atau dengan persentase sebesar 80,7% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara untuk nilai keseluruhan skor aktual dan persentase jawaban responden variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 1885 (83,8%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa merasa kesadaran wajib pajak yang baik pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang.

4.1.3 Variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab “5” terhadap pernyataan-pernyataan tentang sistem administrasi perpajakan modern. Dari 90 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh jawaban mengenai sistem administrasi perpajakan modern sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Rangkapan Responden Mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern									
Kode Item	Sistem Administrasi Perpajakan Modern					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
X3.1	36	34	17	1	2	90	450	82,4%	Sangat Baik
	180	136	51	2	2	371			
X3.2	41	35	12	0	2	90	450	85,1%	Sangat Baik
	205	140	36	0	2	383			
X3.3	44	31	12	1	2	90	450	85,3%	Sangat Baik
	220	124	36	2	2	384			
X3.4	35	31	20	2	2	90	450	81,1%	Sangat Baik
	175	124	60	4	2	365			
X3.5	39	43	4	2	2	90	450	85,6%	Sangat Baik
	195	172	12	4	2	385			
X3.6	34	50	4	0	2	90	450	85,3%	Sangat Baik
	170	200	12	0	2	384			
X3.7	33	47	7	2	1	90	450	84,2%	Sangat Baik
	165	188	21	4	1	379			
X3.8	36	48	4	1	1	90	450	86,0%	Sangat Baik
	180	192	12	2	1	387			
X3.9	27	56	5	1	1	90	450	83,8%	Sangat Baik
	135	224	15	2	1	377			
X3.10	27	51	10	0	2	90	450	82,4%	Sangat Baik
	135	204	30	0	2	371			
X3.11	32	47	8	1	2	90	450	83,6%	Sangat Baik
	160	188	24	2	2	376			
Skor Aktual Sistem Administrasi Perpajakan Modern						4162	84,1%	Sangat Baik	
Skor Ideal Sistem Administrasi Perpajakan Modern						4950			

Sumber: Hasil olah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 tanggapan responden yang diperoleh dari 11 pernyataan di atas mengenai variabel sistem administrasi perpajakan modern dapat diketahui bahwa nilai skor aktual tertinggi adalah sebesar 387 dengan persentase 86% yaitu pada pernyataan dengan kode “X3.8” yang termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan nilai skor aktual dan persentase terendah yaitu pada pernyataan dengan kode “X3.4” yaitu sebesar 365 atau dengan persentase sebesar 81,1% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara untuk nilai

keseluruhan skor aktual dan persentase jawaban responden variabel sistem administrasi perpajakan modern adalah sebesar 4162 (84,1%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa merasa sistem administrasi perpajakan modern yang sangat baik pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang.

4.1.4 Variabel Pemeriksaan Pajak

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab “5” terhadap pernyataan-pernyataan tentang pemeriksaan pajak. Dari 90 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh jawaban mengenai pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

Kode Item	Pemeriksaan Pajak					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
X4.1	25	58	3	2	2	90	450	82,7%	Sangat Baik
	125	232	9	4	2	372			
X4.2	31	50	5	2	2	90	450	83,6%	Sangat Baik
	155	200	15	4	2	376			
X4.3	26	53	6	4	1	90	450	82,0%	Sangat Baik
	130	212	18	8	1	369			
X4.4	30	48	6	5	1	90	450	82,4%	Sangat Baik
	150	192	18	10	1	371			
X4.5	27	53	6	2	2	90	450	82,4%	Sangat Baik
	135	212	18	4	2	371			
X4.6	29	49	4	4	4	90	450	81,1%	Sangat Baik
	145	196	12	8	4	365			
X4.7	34	50	3	3	0	90	450	85,6%	Sangat Baik
	170	200	9	6	0	385			
X4.8	42	41	1	4	2	90	450	86,0%	Sangat Baik
	210	164	3	8	2	387			
Skor Aktual Pemeriksaan Pajak						2996		83,2%	Sangat Baik
Skor Ideal Pemeriksaan Pajak						3600			

Sumber: Hasil olah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 tanggapan responden yang diperoleh dari 8 pernyataan di atas mengenai variabel pemeriksaan pajak dapat diketahui bahwa nilai skor aktual tertinggi adalah sebesar 387 dengan persentase 86% yaitu pada pernyataan dengan kode “X4.8” yang termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan nilai skor aktual dan persentase terendah yaitu pada pernyataan dengan kode “X4.6” yaitu sebesar 365 atau dengan persentase sebesar 81,1% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara untuk nilai keseluruhan skor aktual dan persentase jawaban responden variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 2996 (83,2%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa merasa pemeriksaan pajak yang sangat baik pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang.

4.1.5 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menjawab “5” terhadap pernyataan-pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak. Dari 90 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini diperoleh jawaban mengenai variabel kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Kode Item	Kepatuhan Wajib Pajak					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
Y.1	31	47	8	4	0	90	450	83,3%	Sangat Baik
	155	188	24	8	0	375			
Y.2	46	23	19	2	0	90	450	85,1%	Sangat Baik
	230	92	57	4	0	383			
Y.3	45	29	14	2	0	90	450	86,0%	Sangat Baik
	225	116	42	4	0	387			
Y.4	49	27	12	2	0	90	450	87,3%	Sangat Baik
	245	108	36	4	0	393			
Y.5	48	32	10	0	0	90	450	88,4%	Sangat Baik
	240	128	30	0	0	398			
Y.6	48	33	9	0	0	90	450	88,7%	Sangat

Kode Item	Kepatuhan Wajib Pajak					Skor Aktual	Skor Ideal	Indeks (%)	Kategori
	5	4	3	2	1				
	240	132	27	0	0				
Y.7	45	36	9	0	0	90	450	88,0%	Sangat Baik
	225	144	27	0	0	396			
	Y.8	49	34	7	0	0	90	450	89,3%
245		136	21	0	0	402			
Y.9	41	32	17	0	0	90	450	85,3%	Sangat Baik
	205	128	51	0	0	384			
Y.10	44	33	13	0	0	90	450	86,9%	Sangat Baik
	220	132	39	0	0	391			
Skor Aktual Kepatuhan Wajib Pajak						3908	86,8%	Sangat Baik	
Skor Ideal Kepatuhan Wajib Pajak						4500			

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 tanggapan responden yang diperoleh dari 10 pernyataan di atas mengenai variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai skor aktual tertinggi adalah sebesar 402 dengan persentase 89,3% yaitu pada pernyataan dengan kode “Y.8” yang termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan nilai skor aktual dan persentase terendah yaitu pada pernyataan dengan kode “Y.1” yaitu sebesar 375 atau dengan persentase sebesar 83,3% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara untuk nilai keseluruhan skor aktual dan persentase jawaban responden variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3908 (86,8%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menilai bahwa merasa kepatuhan wajib pajak yang sangat baik pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Instrumen

4.4.1.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah pernyataan dalam kuesioner dapat dijadikan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Valid yang berarti instrumen tersebut dapat digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah apabila hasil dari nilai r hitung $>$ r tabel maka valid. Hasil uji validitas data dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,814	0,207	Valid
	X1.2	0,756	0,207	Valid
	X1.3	0,838	0,207	Valid
	X1.4	0,860	0,207	Valid
	X1.5	0,874	0,207	Valid
	X1.6	0,835	0,207	Valid
	X1.7	0,742	0,207	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,812	0,207	Valid
	X2.2	0,822	0,207	Valid
	X2.3	0,851	0,207	Valid
	X2.4	0,854	0,207	Valid
	X2.5	0,872	0,207	Valid
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	X3.1	0,718	0,207	Valid
	X3.2	0,799	0,207	Valid
	X3.3	0,791	0,207	Valid
	X3.4	0,690	0,207	Valid
	X3.5	0,722	0,207	Valid
	X3.6	0,745	0,207	Valid
	X3.7	0,694	0,207	Valid
	X3.8	0,674	0,207	Valid
	X3.9	0,682	0,207	Valid
	X3.10	0,666	0,207	Valid
	X3.11	0,623	0,207	Valid
Pemeriksaan Pajak	X4.1	0,812	0,207	Valid
	X4.2	0,767	0,207	Valid
	X4.3	0,768	0,207	Valid
	X4.4	0,753	0,207	Valid
	X4.5	0,827	0,207	Valid
	X4.6	0,664	0,207	Valid
	X4.7	0,788	0,207	Valid
	X4.8	0,823	0,207	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,539	0,207	Valid
	Y.2	0,758	0,207	Valid
	Y.3	0,815	0,207	Valid
	Y.4	0,870	0,207	Valid
	Y.5	0,824	0,207	Valid
	Y.6	0,696	0,207	Valid

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
	Y.7	0,794	0,207	Valid
	Y.8	0,586	0,207	Valid
	Y.9	0,600	0,207	Valid
	Y.10	0,631	0,207	Valid

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Dari tabel 4.9 di atas, diperoleh data yang menyatakan bahwa seluruh pernyataan valid, karena nilai korelasi (r_{hitung}) di atas nilai r_{tabel} sebesar 0,207 yang di peroleh dari *pearson correlation* dengan *level of significant* 5% dan $df=n-2$ dengan n sebanyak 90 responden. Nilai korelasi berkisar 0,539 sampai 0,874 lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,207, sehingga seluruh pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

4.4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji apakah suatu instrumen dalam penelitian dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data serta untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan tetap konsisten dan dapat diandalkan jika pengukuran tersebut diulang. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 4.10
Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,914	0,700	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,896	0,700	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,900	0,700	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,901	0,700	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,891	0,700	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Hasil dari tabel 4.10 di atas memperlihatkan *Cronbach's Alpha* masing-masing bernilai 0.914, 0.896, 0,900, 0,901, dan 0.891. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.700, berarti semua pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, pemeriksaan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

4.4.2 Pengujian Asumsi Klasik

4.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *one sample kolmogrov-smirnov test*, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) 26.0 for windows. Kriteria data dikatakan memiliki distribusi normal adalah sebagai berikut.

- *Asymp. Sig* > 0,05, maka data berdistribusi normal
- *Asymp. Sig* < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			90
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	,0000000
		Std. Deviation	3,59772912
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	,081
		Positive	,081

	Negative	-,047
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,198 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 hasil *kolmogorov-smirnov test* menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 ($0,198 > 0,05$) maka hipotesis nol diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

4.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Berikut ini hasil *output* Uji Multikolinearitas:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Tolerance	Statistics VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	,885	1,130
	Kesadaran Wajib Pajak	,885	1,130
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,980	1,020
	Pemeriksaan Pajak	,980	1,020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10, yakni pengetahuan perpajakan = 1,130, kesadaran wajib pajak = 1,130, sistem administrasi perpajakan modern = 1,020, pemeriksaan pajak = 1,020. Nilai *tolerance* berada di atas 0,10, yaitu variabel pengetahuan perpajakan = 0,885, kesadaran wajib pajak = 0,885, sistem administrasi perpajakan modern = 0,980, dan pemerikasaaan pajak = 0,980. Maka di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

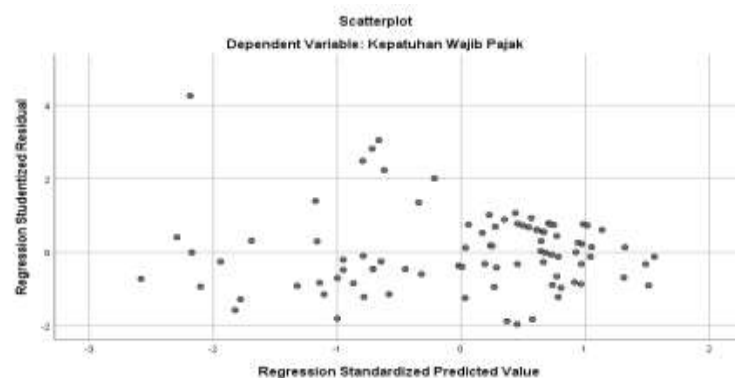
4.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam uji model regresi. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *scater plot* dan *glejser*. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

- b. Jika ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Ghazali (2016:134). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Berikut disajikan data hasil uji heteroskedastisitas metode uji *Scatter Plot* dengan menggunakan bantuan aplikasi program *SPSS 26 for Windows*:



Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Olah Data Menggunakan SPSS 26,0 (diolah peneliti)

Dari Gambar 4.1 hasil penelitian di atas terlihat bahwa distribusi data tidak membentuk pola-pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, atau dengan kata lain, model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Untuk menilai uji secara statistik menggunakan uji *glejser* kriterianya adalah dengan melihat nilai signifikansi sebagai berikut:

- c. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengandung adanya heteroskedastisitas,
- d. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya (ABS_RES). Berikut disajikan data hasil uji heteroskedastisitas metode uji *glejser* dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS 26.0 for Windows:

Tabel 4.13
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,127	2,866		3,533	,001
Pengetahuan Perpajakan	-,061	,056	-,121	-1,098	,275
Kesadaran Wajib Pajak	-,123	,072	-,187	-1,696	,094
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	-,028	,037	-,078	-,743	,460
Pemeriksaan Pajak	-,048	,047	-,107	-1,022	,310

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa seluruh nilai signifikansi variabel independen berada di atas 0,05, yaitu pengetahuan perpajakan = 0,275, kesadaran wajib pajak = 0,094, sistem administrasi perpajakan modern = 0,460, dan pemeriksaan pajak = 0,310. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang diuji.

4.4.3 Model Regresi dan Uji Hipotesis

Persamaan regresi linear yang akan dibentuk sesuai dengan bab sebelumnya, dimana pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai persamaan regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji f), dan koefisien determinasi.

4.4.3.1 Hasil Regresi

Hasil *output* pengolahan data untuk model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,888	4,738		,187	,852
Pengetahuan Perpajakan	,555	,092	,472	6,008	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,452	,120	,296	3,774	,000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,181	,062	,218	2,927	,004
Pemeriksaan Pajak	,226	,078	,217	2,913	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 hasil di atas, maka diperoleh data persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

$$Y = 0,888 + 0,555X_1 + 0,452X_2 + 0,181X_3 + 0,226X_4$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Konstanta (a)

Nilai konstanta (a) sebesar 0,888 artinya apabila variabel dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak bernilai 0, maka diperoleh nilai dari kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,888.

2) Nilai koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan diperoleh sebesar 0,555, nilai koefisien regresi X_1 yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan, yang artinya jika pengetahuan

perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,555 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

- 3) Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak diperoleh sebesar 0,452, nilai koefisien regresi X_2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak, yang artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,452 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi pada variabel sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,181, nilai koefisien regresi X_3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern, yang artinya jika sistem administrasi perpajakan modern mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,181 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.
- 5) Nilai koefisien regresi pada variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,226, nilai koefisien regresi X_4 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak, yang artinya jika pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,226 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.

4.4.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi pada penelitian ini yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan pada uji parsial ini adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel

Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Jika nilai t hitung < nilai t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

2) Berdasarkan nilai signifikansi pada *output SPSS*

Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.15
Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,888	4,738		,187	,852
Pengetahuan Perpajakan	,555	,092	,472	6,008	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,452	,120	,296	3,774	,000
Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,181	,062	,218	2,927	,004
Pemeriksaan Pajak	,226	,078	,217	2,913	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji pengaruh secara parsial dengan t_{tabel} sebesar 1,988, pengujian variabel independen dengan variabel dependen adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear berganda untuk variabel pengetahuan perpajakan, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6,008 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($6,008 > 1,988$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,774 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,774 > 1,988$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

3) Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,927 dengan signifikansi sebesar 0,004. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,927 > 1,988$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,004 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

4) Pengaruh Pemeriksaan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis regresi linear untuk variabel pemeriksaan pajak, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,913 dengan signifikansi sebesar 0,005. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,913 > 1,988$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,005 < 0,05$). Maka kesimpulannya adalah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan yang positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

4.4.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah bersama-sama variabel independen (Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan

pajak) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengujian ini dilakukan dengan melihat *Prob. F-statistics* (F hitung). Apabila *Prob. F-statistic* (F hitung) lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila *Prob. F-statistic* (F hitung) lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini *output* uji simultan F:

Tabel 4.16
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1329,970	4	332,493	24,533	,000 ^b
	Residual	1151,985	85	13,553		
	Total	2481,956	89			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji simultan dengan F_{tabel} sebesar 2,479 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 24,533 dan nilai *Prob (F-Statistics)* sebesar 0,000. Karena nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($24,533 > 2,479$) dan nilai signifikansi $<$ tingkat signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3.4 R-Square (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependennya, atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi

pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini *output* uji koefisien determinasi:

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732 ^a	,536	,514	3,68141

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26,0, 2023

Dari tabel 4.17 di atas koefisien determinasi dapat dilihat pada *R-Square* yaitu sebesar 0,536 atau 53,6% artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak secara simultan mampu memberikan penjelasan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 53,6% sedangkan sisanya sebesar 46,4% dijelaskan (dipengaruhi) oleh faktor lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya antara lain: kualitas pelayanan, kualitas penegakan hukum perpajakan, tinggi rendahnya tarif pajak, dan perilaku wajib pajak. Rahayu (2020:193)

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis pengetahuan perpajakan yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai *t* hitung sebesar 6,008 dan nilai *t* tabel pada taraf keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,988. Karena nilai *t* hitung > *t* tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sabang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofianti dan Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai perpajakan maka akan semakin patuh pula dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi bahwa pengetahuan perpajakan dapat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini merupakan faktor internal yang berasal dari wajib pajak.

4.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis kesadaran wajib pajak yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 3,774 dan nilai t tabel pada taraf keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,988. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_2 diterima dan H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sabang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarasawati, *et al* (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak maka akan semakin patuh pula dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi bahwa kesadaran wajib pajak dapat dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, hal ini merupakan faktor internal yang berasal dari wajib pajak.

4.5.3 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis sistem administrasi perpajakan modern yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 2,927 dan nilai t tabel pada taraf keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 1,988. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_3 diterima dan H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sabang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Duwiri, *et al* (2020) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi bahwa sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4.5.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji hipotesis pemeriksaan pajak yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 2,913 dan nilai t tabel pada taraf keyakinan sebesar 95%

menunjukkan angka sebesar 1,988. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_4 diterima dan H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sabang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, *et al* (2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik kualitas pemeriksaan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi bahwa pemeriksaan pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan terhadap sistem atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan semula sehingga menghasilkan efektifitas dan hasil yang maksimal.

4.5.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 24,533 dan nilai F tabel menunjukkan angka sebesar 2,479. Karena nilai F hitung $>$ F tabel maka H_5 diterima dan H_0 ditolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sabang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Yushita (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Sabang)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dan analisis pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang dengan arah pengaruh positif.
2. Dari hasil penelitian dan analisis pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang dengan arah pengaruh positif.
3. Dari hasil penelitian dan analisis pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang dengan arah pengaruh positif.
4. Dari hasil penelitian dan analisis pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang dengan arah pengaruh positif.

5. Dari hasil pengujian simultan yang dilakukan oleh peneliti membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak UMKM Wilayah Kota Sabang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Pemeriksaan Pajak sebesar 53,6% sedangkan sisanya sebesar 46,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya, sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya, dapat melakukan objek penelitian tidak hanya pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Kota Sabang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I. D. T. E. Putri dan A. Suangga. 2019. Effect of Administrative Reform and Taxpayer Satisfaction on Taxpayer Compliance As Recorded By Tax Offices of Majalaya Bandung. *Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR)*. Vol.1 No.1, hal. 64–76.
- Antaranews.com. 2021. Kemenkop: Kontribusi perpajakan sektor UMKM perlu ditingkatkan.(<https://www.antaranews.com/berita/2101898/kemenkop-kontribusi-perpajakan-sektor-umkm-perlu-ditingkatkan#mobile-src>). Diakses 21 November 2022.
- Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, A. P. dan B. Susanto. 2021. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). *The 4th Beneficium (Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology)*. Vol.19 No.4, hlm. 376–390.
- Duwiri, M. Y. T. A. Layuk dan N. H. Bleskadit. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*. Vol.15 No.2, hlm. 20–34.
- Ermawati, N. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*. Vol.10 No.1, hlm. 106–122.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Multivariate Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS)*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, A. dan N. Kholis. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Vol.4 No.1, hlm. 56–67.
- Harjo, D. 2019. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 - Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Hasanah, N. S. Muhtar dan I. Muliastuti. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Irianto, E. S. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Khasanah, S. N. dan A. N. Yushita. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*. Vol.4 No.8, hlm. 1–13.
- Kurniawan, A. W. dan Z. Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Lesmana, A. L. dan B. Setyadi. 2020. Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol.17 No.1, hlm. 1–15.
- Mahendra, B. S. Y. C. Samrotun dan P. Siddi. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*. Vol.9 No.1, hlm. 28–40.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revi. CV. Andi Offset.
- Menteri Keuangan RI. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugraheni, A. D. dan A. Purwanto. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.4 No.3, hlm. 1–14.
- Nugroho, R. A. dan Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.1 No.2, hlm. 1–11.
- Prakoso, A. G. Wicaksono S. Iswono Y. Puspita dan N. D. Bidhari, Sandhika Cipta Kusumaningrum. 2019. Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Kediri*. Vol.4 No.1, hlm. 18–31.
- Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi Revi. Surabaya: Zifatama Publishing.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revi. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Saad, B. 2017. Analisis Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak WPOP Di KPP Pratama DKI Jakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol.4 No.2, hlm. 13–29.
- Sarasawati, Z. E. E. Masitoh dan R. R. Dewi. 2018. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*. Vol.2 No.2, hlm. 45–52.
- Siyoto, S. dan A. Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sofianti, M. dan D. Wahyudi. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol.13 No.1, hlm. 180–92.
- Sofiyana, R. L. S. D. Hamid dan M. F. Riza. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol.3 No.1, hlm. 1–8.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sumartik. 2018. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Undang-Undang RI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wijayanti, R. N. Rizal dan R. Bahtiar. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. Edisi Keti. Lumajang: Widya Gama Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Aceh, saya:

Nama : Dinar Syavira

NIM : 1902110051

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Wilayah Kota Sabang)”**.

Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

Dinar Syavira

Karakteristik Responden:

Berilah tanda (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama Responden :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Usia : ☐ < 21 tahun ☐ 21-30 tahun

☐ 31-40 tahun ☐ 41-50 tahun

☐ > 50 tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP

☐ SMA ☐ D3

☐ S1 ☐ Lainnya

Jenis Usaha : ☐ Perdagangan ☐ Industri

☐ Jasa ☐ Kuliner

☐ Pertanian ☐ Peternakan

☐ Perikanan ☐ Lainnya

Lama Usaha : ☐ < 2 tahun ☐ 2-4 tahun

☐ 4-6 tahun ☐ 6-8 tahun

☐ > 8 tahun

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Point Penilaian:

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Tidak Setuju (TS) : 2

Kurang Setuju (KS) : 3

Setuju (S) : 4

Sangat Setuju (SS) : 5

1. Pengetahuan Perpajakan (X₁)

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
2.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					
3.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.					
4.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
5.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
6.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri).					
7.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.					

2. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mengetahui kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					
2.	Saya mengetahui kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara.					
3.	Saya mengetahui kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.					
4.	Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela.					
5.	Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar.					

3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X₃)

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Struktur organisasi pada KPP modern yang telah berubah menjadi berdasarkan fungsi memudahkan jalur penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan Wajib Pajak.					
2.	Adanya <i>Account Representative</i> benar-benar melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.					
3.	Kemudahan pelayanan dengan adanya <i>Account Representative</i> yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya.					
4.	Sistem administrasi modern (digitalisasi : e-SPT, e-filing) sudah benar-benar dimanfaatkan demi kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.					

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
5.	Pembayaran secara <i>online</i> (teller-bank, internet banking, ATM) memudahkan Wajib Pajak karena prosesnya cepat.					
6.	Sistem pelaporan pajak secara elektronik dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.					
7.	<i>Complaint Center</i> memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak apabila ada keberatan dan keluhan tentang pajak.					
8.	Aparat pajak mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak mengenai perpajakan.					
9.	Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada wajib pajak, petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga wajib pajak dapat mengerti dengan baik.					
10.	Aparat pajak memberikan pelayanan yang sama terhadap semua Wajib Pajak (tanpa memandang besar kecilnya pajak terutang)					
11.	Adanya kejujuran aparat pajak (ketepatan dan ketegasan) dalam penerapan undang-undang / peraturan.					

4. Pemeriksaan Pajak (X₄)

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.					
2.	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
3.	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.					
4.	Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka					

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
	harus dilakukan pemeriksaan.					
5.	Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan.					
6.	Apabila ada wajib pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan.					
7.	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.					
8.	Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan.					

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.					
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					
4.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
5.	Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak berlaku jujur					
6.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
7.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
8.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
9.	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan.					

No	Item Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
10.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

Lampiran 2 Master Tabel

No. Res	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)							Total	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)					Total	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₃)											Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	
1	4	4	3	5	4	3	3	26	4	4	4	5	3	20	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	45
2	4	3	3	3	4	3	4	24	4	3	3	3	3	16	3	3	3	3	5	5	4	3	4	3	4	40
3	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
4	2	1	5	4	4	3	5	24	4	4	2	2	3	15	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	5	5	4	23	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	50
6	5	5	4	4	4	4	4	30	5	3	4	4	4	20	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	50
7	3	5	3	5	5	5	4	30	4	5	4	5	5	23	3	4	5	2	4	4	4	4	4	4	4	42
8	3	5	4	5	4	4	4	29	5	5	5	4	5	24	3	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	47
9	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
10	4	4	3	4	4	4	3	26	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
12	4	5	5	5	5	5	5	34	5	4	5	4	5	23	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	47
13	5	5	5	5	5	5	4	34	4	5	5	5	5	24	3	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	49
14	4	5	5	4	5	5	5	33	4	4	4	5	4	21	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	45
15	5	4	4	5	4	3	4	29	4	4	3	4	4	19	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	40
16	5	5	5	5	5	5	3	33	4	5	5	5	4	23	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	48
17	5	5	5	5	5	4	4	33	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
19	4	5	5	4	5	5	5	33	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	48
20	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
21	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	3	4	4	2	4	4	4	4	44

No. Res	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)							Total	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)					Total	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₃)											Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	
22	4	5	5	4	5	4	5	32	5	5	4	4	4	22	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	42
23	5	5	5	5	5	5	4	34	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
24	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	3	4	19	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	43
25	4	5	5	4	5	4	3	30	4	4	4	4	3	19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
26	4	5	4	3	4	3	4	27	4	2	4	3	3	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
27	5	5	5	5	5	5	4	34	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	43
28	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	51
29	3	5	5	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	4	4	3	5	5	4	4	41
30	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	3	5	5	21	4	3	5	3	5	4	4	4	5	4	4	45
31	5	5	5	5	4	4	5	33	3	3	5	5	4	20	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	48
32	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	50
33	3	1	4	3	4	3	3	21	3	3	3	3	3	15	2	3	3	3	4	5	4	4	4	5	5	42
34	3	4	3	3	4	4	4	25	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	44
35	5	5	5	5	5	5	5	35	4	3	4	5	4	20	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	51
36	3	3	3	3	4	4	3	23	4	4	3	2	3	16	3	3	2	2	4	4	5	4	4	4	4	39
37	5	4	5	5	5	5	4	33	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	46
38	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	4	5	4	5	4	5	4	43
39	4	3	4	4	3	4	3	25	3	4	4	3	4	18	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	49
40	4	5	5	4	5	5	4	32	3	3	4	5	4	19	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	51
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	5	5	5	22	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	52
42	5	4	3	4	4	4	4	28	4	3	4	5	4	20	4	4	3	3	5	4	4	5	3	4	4	43
43	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	3	5	3	4	5	5	4	45
44	5	5	5	5	5	5	4	34	5	5	4	5	4	23	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	3	49

No. Res	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)							Total	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)					Total	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₃)											Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	
45	4	5	5	4	5	5	4	32	4	4	4	5	4	21	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	50
46	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	5	23	5	4	5	4	5	4	4	4	5	3	3	46
47	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	5	23	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	47
48	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25	5	5	4	3	5	5	4	5	4	4	3	47
49	5	5	5	5	5	5	4	34	5	4	5	5	5	24	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	52
50	5	5	5	5	5	5	4	34	4	4	5	4	5	22	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	51
51	5	5	5	5	5	5	5	35	1	1	2	1	1	6	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	52
52	5	5	5	5	5	5	4	34	3	4	5	5	4	21	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	12
53	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	54
54	2	3	3	3	4	3	3	21	4	4	3	4	3	18	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	48
55	5	5	5	5	4	5	4	33	5	5	4	5	4	23	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	48
56	4	5	5	5	5	5	4	33	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	3	4	4	5	5	4	49
57	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	52
58	4	5	5	4	5	5	5	33	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	53
59	5	5	5	5	5	4	5	34	5	5	4	5	5	24	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	13
60	5	5	5	5	5	5	5	35	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	51
61	1	2	1	1	1	2	1	9	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	52
62	4	5	5	4	5	4	4	31	4	4	5	5	5	23	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	53
63	4	5	5	4	4	4	3	29	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	48
64	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	4	5	4	23	4	4	5	5	5	5	4	3	4	3	3	45
65	5	5	5	5	5	4	5	34	4	4	5	5	5	23	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	50
66	4	5	5	4	5	5	5	33	4	4	5	5	5	23	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	52
67	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	5	23	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	50

No. Res	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)							Total	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)					Total	Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X ₃)											Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	
68	4	5	5	4	4	4	4	30	4	4	5	4	5	22	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	3	48
69	4	3	4	4	5	4	4	28	4	4	3	4	3	18	3	3	3	3	5	4	4	5	4	5	5	44
70	4	5	5	4	5	5	4	32	4	4	5	5	5	23	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	47
71	4	5	5	4	5	5	4	32	4	4	4	5	4	21	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	48
72	4	5	5	4	5	4	5	32	4	4	5	5	5	23	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	49
73	5	5	5	5	5	4	5	34	4	4	5	5	5	23	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	50
74	4	5	5	4	5	5	3	31	4	4	3	4	3	18	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	5	37
75	5	5	5	5	5	4	5	34	4	4	5	5	5	23	5	5	5	5	3	4	5	4	4	4	5	49
76	4	5	5	5	5	5	5	34	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	2	3	3	4	3	3	5	43
77	4	5	5	4	5	4	4	31	4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	42
78	5	5	5	5	5	4	5	34	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	49
79	3	5	5	5	5	5	4	32	4	4	5	5	5	23	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	51
80	5	5	5	5	5	5	4	34	4	4	3	5	4	20	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	53
81	3	5	5	3	4	3	3	26	4	4	3	4	4	19	3	3	3	4	3	4	5	5	5	4	4	43
82	3	4	4	4	3	4	5	27	4	4	4	5	4	21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	54
83	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	4	22	5	4	4	3	5	4	4	4	4	5	5	47
84	4	5	5	5	5	5	5	34	5	4	5	4	5	23	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	48
85	5	5	5	5	5	5	4	34	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	50
86	4	5	5	4	5	5	5	33	4	4	5	5	4	22	4	5	5	5	4	4	5	5	3	3	4	47
87	5	2	5	5	5	5	5	32	4	4	4	5	5	22	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	4	50
88	5	5	5	5	5	5	4	34	4	4	4	5	4	21	5	5	5	5	5	5	3	3	4	3	3	46
89	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	5	3	20	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	52
90	4	5	5	4	5	4	5	32	4	4	3	4	5	20	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	48

Lampiran 3 Master Tabel (Lanjutan)

No. Res	Pemeriksaan Pajak (X ₄)								Total	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	38
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	3	3	3	3	4	5	4	35
3	4	4	4	5	4	4	5	4	34	5	4	2	4	4	4	4	4	4	4	39
4	4	4	4	4	3	3	4	2	28	3	3	5	2	4	4	4	3	4	4	36
5	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5	42
6	4	5	5	4	4	4	5	4	35	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	39
7	4	4	4	2	3	4	4	4	29	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	47
8	5	5	5	4	4	4	4	5	36	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	47
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	37
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	33
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	46
13	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
14	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	46
15	4	4	2	2	4	4	4	4	28	2	4	3	4	4	4	4	4	3	3	35
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
18	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
19	4	4	4	4	3	4	4	5	32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	48
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
21	4	4	4	2	4	4	4	2	28	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	47

No. Res	Pemeriksaan Pajak (X ₄)								Total	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
22	4	4	4	4	5	5	5	5	36	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	45
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	41
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	40
25	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	3	5	4	3	3	4	5	5	4	40
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	35
27	4	4	4	3	3	4	4	4	30	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	44
28	5	5	4	5	5	4	5	5	38	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
29	5	3	4	4	5	5	5	4	35	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
30	4	4	5	4	4	4	4	5	34	5	5	3	4	4	4	4	4	3	3	39
31	4	5	5	5	4	4	4	4	35	4	4	4	3	5	3	4	4	4	3	38
32	5	5	4	5	5	4	5	5	38	5	4	4	5	5	5	5	3	5	5	46
33	5	5	5	5	4	4	4	5	37	4	3	2	2	3	3	3	4	4	4	32
34	5	2	3	4	4	4	5	5	32	5	4	3	3	3	4	3	3	4	4	36
35	5	5	4	5	5	4	4	5	37	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	44
36	4	5	4	5	5	5	5	5	38	2	2	3	3	3	3	3	5	4	4	32
37	4	5	4	4	4	5	4	4	34	2	2	4	4	4	5	4	5	4	4	38
38	4	3	5	5	4	4	5	5	35	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	35
39	4	5	5	5	4	5	5	5	38	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	40
40	4	5	4	4	4	5	4	4	34	5	5	4	4	4	5	4	5	3	4	43
41	5	5	4	4	5	5	5	5	38	5	5	5	5	4	4	4	5	3	5	45
42	5	3	4	4	5	5	4	5	35	4	3	3	3	3	5	4	5	3	4	37
43	4	5	5	4	4	4	5	5	36	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	47
44	4	5	4	4	4	5	5	5	36	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	46

No. Res	Pemeriksaan Pajak (X ₄)								Total	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
45	4	5	5	4	5	3	4	5	35	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
46	4	5	5	3	5	5	4	5	36	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
47	4	4	3	4	2	4	4	5	30	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48
48	5	4	5	4	4	5	5	5	37	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	46
49	4	5	5	5	4	1	4	5	33	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	48
50	4	5	4	4	4	4	4	4	33	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	44
51	5	4	4	5	4	4	4	5	35	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
52	5	4	4	3	4	5	4	4	33	4	3	5	4	4	5	5	5	3	5	43
53	1	1	2	1	1	1	2	1	10	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	46
54	2	3	2	2	3	2	2	2	18	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	31
55	5	5	4	5	4	2	5	4	34	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	45
56	4	5	5	3	4	4	5	4	34	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
57	4	4	4	5	5	5	5	4	36	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
58	1	1	2	2	1	1	2	1	11	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
59	4	4	3	5	4	4	5	5	34	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
60	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
61	4	5	5	5	4	4	5	5	37	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	47
62	4	5	4	5	5	2	4	5	34	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	48
63	4	5	3	4	4	4	5	4	33	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	40
64	4	5	4	5	5	5	4	5	37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
65	5	4	5	5	4	4	5	4	36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
66	4	4	4	5	4	5	5	5	36	3	5	4	5	4	5	4	5	5	4	44
67	5	4	4	5	5	1	5	5	34	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	47

No. Res	Pemeriksaan Pajak (X ₄)								Total	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
68	5	5	5	5	4	4	5	5	38	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	48
69	2	2	1	3	2	2	3	2	17	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	31
70	5	4	5	5	5	5	5	4	38	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
71	4	5	4	4	4	5	4	4	34	4	4	4	5	4	3	4	5	5	5	43
72	4	4	4	4	5	4	4	5	34	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
73	4	4	4	4	4	4	4	4	32	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	42
74	4	4	4	4	4	4	4	5	33	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	36
75	4	4	3	4	4	5	4	3	31	4	5	5	5	5	5	5	4	3	5	46
76	4	4	5	4	5	5	5	4	36	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
77	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	3	4	5	4	5	4	5	5	5	44
78	5	4	4	4	4	4	4	5	34	4	5	5	3	5	5	5	4	4	3	43
79	3	4	4	5	4	5	5	5	35	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
80	4	4	4	5	5	4	4	5	35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
81	5	4	4	5	5	5	5	4	37	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	37
82	3	3	3	4	3	3	3	4	26	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
83	5	5	5	5	5	5	5	5	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
84	5	4	5	4	4	3	5	4	34	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
85	4	5	5	5	5	5	4	5	38	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	46
86	5	4	5	3	5	5	3	4	34	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
87	5	4	4	4	5	5	4	5	36	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
88	4	5	5	5	5	5	5	5	39	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
89	4	4	4	4	5	4	4	4	33	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	46
90	4	4	5	4	4	5	5	4	35	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	48

Lampiran 3 R Tabel

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Lampiran 4 T Tabel

Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed)					
v = n - (k+1)	α				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	6,314	12,706	25,452	63,657	127,321
2	2,920	4,303	6,205	9,925	14,089
3	2,353	3,182	4,177	5,841	7,453
4	2,132	2,776	3,495	4,604	5,598
5	2,015	2,571	3,163	4,032	4,773
6	1,943	2,447	2,969	3,707	4,317
7	1,895	2,365	2,841	3,499	4,029
8	1,860	2,306	2,752	3,355	3,833
9	1,833	2,262	2,685	3,250	3,690
10	1,812	2,228	2,634	3,169	3,581
11	1,796	2,201	2,593	3,106	3,497
12	1,782	2,179	2,560	3,055	3,428
13	1,771	2,160	2,533	3,012	3,372
14	1,761	2,145	2,510	2,977	3,326
15	1,753	2,131	2,490	2,947	3,286
16	1,746	2,120	2,473	2,921	3,252
17	1,740	2,110	2,458	2,898	3,222
18	1,734	2,101	2,445	2,878	3,197
19	1,729	2,093	2,433	2,861	3,174
20	1,725	2,086	2,423	2,845	3,153
21	1,721	2,080	2,414	2,831	3,135
22	1,717	2,074	2,405	2,819	3,119
23	1,714	2,069	2,398	2,807	3,104
24	1,711	2,064	2,391	2,797	3,091
25	1,708	2,060	2,385	2,787	3,078
26	1,706	2,056	2,379	2,779	3,067
27	1,703	2,052	2,373	2,771	3,057
28	1,701	2,048	2,368	2,763	3,047
29	1,699	2,045	2,364	2,756	3,038
30	1,697	2,042	2,360	2,750	3,030
31	1,696	2,040	2,356	2,744	3,022
32	1,694	2,037	2,352	2,738	3,015
33	1,692	2,035	2,348	2,733	3,008
34	1,691	2,032	2,345	2,728	3,002
35	1,690	2,030	2,342	2,724	2,996
36	1,688	2,028	2,339	2,719	2,990
37	1,687	2,026	2,336	2,715	2,985
38	1,686	2,024	2,334	2,712	2,980
39	1,685	2,023	2,331	2,708	2,976
40	1,684	2,021	2,329	2,704	2,971
41	1,683	2,020	2,327	2,701	2,967

Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed)					
v = n - (k+1)	α				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
42	1,682	2,018	2,325	2,698	2,963
43	1,681	2,017	2,323	2,695	2,959
44	1,680	2,015	2,321	2,692	2,956
45	1,679	2,014	2,319	2,690	2,952
46	1,679	2,013	2,317	2,687	2,949
47	1,678	2,012	2,315	2,685	2,946
48	1,677	2,011	2,314	2,682	2,943
49	1,677	2,010	2,312	2,680	2,940
50	1,676	2,009	2,311	2,678	2,937
51	1,675	2,008	2,310	2,676	2,934
52	1,675	2,007	2,308	2,674	2,932
53	1,674	2,006	2,307	2,672	2,929
54	1,674	2,005	2,306	2,670	2,927
55	1,673	2,004	2,304	2,668	2,925
56	1,673	2,003	2,303	2,667	2,923
57	1,672	2,002	2,302	2,665	2,920
58	1,672	2,002	2,301	2,663	2,918
59	1,671	2,001	2,300	2,662	2,916
60	1,671	2,000	2,299	2,660	2,915
61	1,670	2,000	2,298	2,659	2,913
62	1,670	1,999	2,297	2,657	2,911
63	1,669	1,998	2,296	2,656	2,909
64	1,669	1,998	2,295	2,655	2,908
65	1,669	1,997	2,295	2,654	2,906
66	1,668	1,997	2,294	2,652	2,904
67	1,668	1,996	2,293	2,651	2,903
68	1,668	1,995	2,292	2,650	2,902
69	1,667	1,995	2,291	2,649	2,900
70	1,667	1,994	2,291	2,648	2,899
71	1,667	1,994	2,290	2,647	2,897
72	1,666	1,993	2,289	2,646	2,896
73	1,666	1,993	2,289	2,645	2,895
74	1,666	1,993	2,288	2,644	2,894
75	1,665	1,992	2,287	2,643	2,892
76	1,665	1,992	2,287	2,642	2,891
77	1,665	1,991	2,286	2,641	2,890
78	1,665	1,991	2,285	2,640	2,889
79	1,664	1,990	2,285	2,640	2,888
80	1,664	1,990	2,284	2,639	2,887
81	1,664	1,990	2,284	2,638	2,886
82	1,664	1,989	2,283	2,637	2,885
83	1,663	1,989	2,283	2,636	2,884
84	1,663	1,989	2,282	2,636	2,883

Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed)					
v = n - (k+1)	α				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
85	1,663	1,988	2,282	2,635	2,882
86	1,663	1,988	2,281	2,634	2,881
87	1,663	1,988	2,281	2,634	2,880
88	1,662	1,987	2,280	2,633	2,880
89	1,662	1,987	2,280	2,632	2,879
90	1,662	1,987	2,280	2,632	2,878
91	1,662	1,986	2,279	2,631	2,877
92	1,662	1,986	2,279	2,630	2,876
93	1,661	1,986	2,278	2,630	2,876
94	1,661	1,986	2,278	2,629	2,875
95	1,661	1,985	2,277	2,629	2,874
96	1,661	1,985	2,277	2,628	2,873
97	1,661	1,985	2,277	2,627	2,873
98	1,661	1,984	2,276	2,627	2,872
99	1,660	1,984	2,276	2,626	2,871
100	1,660	1,984	2,276	2,626	2,871
101	1,660	1,984	2,275	2,625	2,870
102	1,660	1,983	2,275	2,625	2,869
103	1,660	1,983	2,275	2,624	2,869
104	1,660	1,983	2,274	2,624	2,868
105	1,659	1,983	2,274	2,623	2,868
106	1,659	1,983	2,274	2,623	2,867
107	1,659	1,982	2,273	2,623	2,866
108	1,659	1,982	2,273	2,622	2,866
109	1,659	1,982	2,273	2,622	2,865
110	1,659	1,982	2,272	2,621	2,865
111	1,659	1,982	2,272	2,621	2,864
112	1,659	1,981	2,272	2,620	2,864
113	1,658	1,981	2,272	2,620	2,863
114	1,658	1,981	2,271	2,620	2,863
115	1,658	1,981	2,271	2,619	2,862
116	1,658	1,981	2,271	2,619	2,862
117	1,658	1,980	2,271	2,619	2,861
118	1,658	1,980	2,270	2,618	2,861
119	1,658	1,980	2,270	2,618	2,860
120	1,658	1,980	2,270	2,617	2,860
121	1,658	1,980	2,270	2,617	2,859
122	1,657	1,980	2,269	2,617	2,859
123	1,657	1,979	2,269	2,616	2,859
124	1,657	1,979	2,269	2,616	2,858
125	1,657	1,979	2,269	2,616	2,858
126	1,657	1,979	2,269	2,615	2,857
127	1,657	1,979	2,268	2,615	2,857

Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed)					
v = n - (k+1)	α				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
128	1,657	1,979	2,268	2,615	2,857
129	1,657	1,979	2,268	2,614	2,856
130	1,657	1,978	2,268	2,614	2,856
131	1,657	1,978	2,267	2,614	2,855
132	1,656	1,978	2,267	2,614	2,855
133	1,656	1,978	2,267	2,613	2,855
134	1,656	1,978	2,267	2,613	2,854
135	1,656	1,978	2,267	2,613	2,854
136	1,656	1,978	2,266	2,612	2,854
137	1,656	1,977	2,266	2,612	2,853
138	1,656	1,977	2,266	2,612	2,853
139	1,656	1,977	2,266	2,612	2,853
140	1,656	1,977	2,266	2,611	2,852
141	1,656	1,977	2,266	2,611	2,852
142	1,656	1,977	2,265	2,611	2,852
143	1,656	1,977	2,265	2,611	2,851
144	1,656	1,977	2,265	2,610	2,851
145	1,655	1,976	2,265	2,610	2,851
146	1,655	1,976	2,265	2,610	2,850
147	1,655	1,976	2,265	2,610	2,850
148	1,655	1,976	2,264	2,609	2,850
149	1,655	1,976	2,264	2,609	2,849
150	1,655	1,976	2,264	2,609	2,849
151	1,655	1,976	2,264	2,609	2,849
152	1,655	1,976	2,264	2,609	2,849
153	1,655	1,976	2,264	2,608	2,848
154	1,655	1,975	2,264	2,608	2,848
155	1,655	1,975	2,263	2,608	2,848
156	1,655	1,975	2,263	2,608	2,848
157	1,655	1,975	2,263	2,608	2,847
158	1,655	1,975	2,263	2,607	2,847
159	1,654	1,975	2,263	2,607	2,847
160	1,654	1,975	2,263	2,607	2,846
161	1,654	1,975	2,263	2,607	2,846
162	1,654	1,975	2,262	2,607	2,846
163	1,654	1,975	2,262	2,606	2,846
164	1,654	1,975	2,262	2,606	2,846
165	1,654	1,974	2,262	2,606	2,845
166	1,654	1,974	2,262	2,606	2,845
167	1,654	1,974	2,262	2,606	2,845
168	1,654	1,974	2,262	2,605	2,845
169	1,654	1,974	2,262	2,605	2,844
170	1,654	1,974	2,261	2,605	2,844

Critical Values for the t-Distribution (Two-Tailed)					
v = n - (k+1)	α				
	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
171	1,654	1,974	2,261	2,605	2,844
172	1,654	1,974	2,261	2,605	2,844
173	1,654	1,974	2,261	2,605	2,843
174	1,654	1,974	2,261	2,604	2,843
175	1,654	1,974	2,261	2,604	2,843
176	1,654	1,974	2,261	2,604	2,843
177	1,654	1,973	2,261	2,604	2,843
178	1,653	1,973	2,261	2,604	2,842
179	1,653	1,973	2,260	2,604	2,842
180	1,653	1,973	2,260	2,603	2,842
181	1,653	1,973	2,260	2,603	2,842
182	1,653	1,973	2,260	2,603	2,842
183	1,653	1,973	2,260	2,603	2,841
184	1,653	1,973	2,260	2,603	2,841
185	1,653	1,973	2,260	2,603	2,841
186	1,653	1,973	2,260	2,603	2,841
187	1,653	1,973	2,260	2,602	2,841
188	1,653	1,973	2,259	2,602	2,841
189	1,653	1,973	2,259	2,602	2,840
190	1,653	1,973	2,259	2,602	2,840
191	1,653	1,972	2,259	2,602	2,840
192	1,653	1,972	2,259	2,602	2,840
193	1,653	1,972	2,259	2,602	2,840
194	1,653	1,972	2,259	2,601	2,839
195	1,653	1,972	2,259	2,601	2,839
196	1,653	1,972	2,259	2,601	2,839
197	1,653	1,972	2,259	2,601	2,839
198	1,653	1,972	2,259	2,601	2,839
199	1,653	1,972	2,258	2,601	2,839
200	1,653	1,972	2,258	2,601	2,839

Lampiran 5 F Tabel

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
$v_1 = n - (k+1)$	$v_2 = k$									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161,448	199,500	215,707	224,583	230,162	233,986	236,768	238,883	240,543	241,882
2	18,513	19,000	19,164	19,247	19,296	19,330	19,353	19,371	19,385	19,396
3	10,128	9,552	9,277	9,117	9,013	8,941	8,887	8,845	8,812	8,786
4	7,709	6,944	6,591	6,388	6,256	6,163	6,094	6,041	5,999	5,964
5	6,608	5,786	5,409	5,192	5,050	4,950	4,876	4,818	4,772	4,735
6	5,987	5,143	4,757	4,534	4,387	4,284	4,207	4,147	4,099	4,060
7	5,591	4,737	4,347	4,120	3,972	3,866	3,787	3,726	3,677	3,637
8	5,318	4,459	4,066	3,838	3,687	3,581	3,500	3,438	3,388	3,347
9	5,117	4,256	3,863	3,633	3,482	3,374	3,293	3,230	3,179	3,137
10	4,965	4,103	3,708	3,478	3,326	3,217	3,135	3,072	3,020	2,978
11	4,844	3,982	3,587	3,357	3,204	3,095	3,012	2,948	2,896	2,854
12	4,747	3,885	3,490	3,259	3,106	2,996	2,913	2,849	2,796	2,753
13	4,667	3,806	3,411	3,179	3,025	2,915	2,832	2,767	2,714	2,671
14	4,600	3,739	3,344	3,112	2,958	2,848	2,764	2,699	2,646	2,602
15	4,543	3,682	3,287	3,056	2,901	2,790	2,707	2,641	2,588	2,544
16	4,494	3,634	3,239	3,007	2,852	2,741	2,657	2,591	2,538	2,494
17	4,451	3,592	3,197	2,965	2,810	2,699	2,614	2,548	2,494	2,450
18	4,414	3,555	3,160	2,928	2,773	2,661	2,577	2,510	2,456	2,412
19	4,381	3,522	3,127	2,895	2,740	2,628	2,544	2,477	2,423	2,378
20	4,351	3,493	3,098	2,866	2,711	2,599	2,514	2,447	2,393	2,348

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
21	4,325	3,467	3,072	2,840	2,685	2,573	2,488	2,420	2,366	2,321
22	4,301	3,443	3,049	2,817	2,661	2,549	2,464	2,397	2,342	2,297
23	4,279	3,422	3,028	2,796	2,640	2,528	2,442	2,375	2,320	2,275
24	4,260	3,403	3,009	2,776	2,621	2,508	2,423	2,355	2,300	2,255
25	4,242	3,385	2,991	2,759	2,603	2,490	2,405	2,337	2,282	2,236
26	4,225	3,369	2,975	2,743	2,587	2,474	2,388	2,321	2,265	2,220
27	4,210	3,354	2,960	2,728	2,572	2,459	2,373	2,305	2,250	2,204
28	4,196	3,340	2,947	2,714	2,558	2,445	2,359	2,291	2,236	2,190
29	4,183	3,328	2,934	2,701	2,545	2,432	2,346	2,278	2,223	2,177
30	4,171	3,316	2,922	2,690	2,534	2,421	2,334	2,266	2,211	2,165
31	4,160	3,305	2,911	2,679	2,523	2,409	2,323	2,255	2,199	2,153
32	4,149	3,295	2,901	2,668	2,512	2,399	2,313	2,244	2,189	2,142
33	4,139	3,285	2,892	2,659	2,503	2,389	2,303	2,235	2,179	2,133
34	4,130	3,276	2,883	2,650	2,494	2,380	2,294	2,225	2,170	2,123
35	4,121	3,267	2,874	2,641	2,485	2,372	2,285	2,217	2,161	2,114
36	4,113	3,259	2,866	2,634	2,477	2,364	2,277	2,209	2,153	2,106
37	4,105	3,252	2,859	2,626	2,470	2,356	2,270	2,201	2,145	2,098
38	4,098	3,245	2,852	2,619	2,463	2,349	2,262	2,194	2,138	2,091
39	4,091	3,238	2,845	2,612	2,456	2,342	2,255	2,187	2,131	2,084
40	4,085	3,232	2,839	2,606	2,449	2,336	2,249	2,180	2,124	2,077
41	4,079	3,226	2,833	2,600	2,443	2,330	2,243	2,174	2,118	2,071
42	4,073	3,220	2,827	2,594	2,438	2,324	2,237	2,168	2,112	2,065
43	4,067	3,214	2,822	2,589	2,432	2,318	2,232	2,163	2,106	2,059
44	4,062	3,209	2,816	2,584	2,427	2,313	2,226	2,157	2,101	2,054
45	4,057	3,204	2,812	2,579	2,422	2,308	2,221	2,152	2,096	2,049

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
46	4,052	3,200	2,807	2,574	2,417	2,304	2,216	2,147	2,091	2,044
47	4,047	3,195	2,802	2,570	2,413	2,299	2,212	2,143	2,086	2,039
48	4,043	3,191	2,798	2,565	2,409	2,295	2,207	2,138	2,082	2,035
49	4,038	3,187	2,794	2,561	2,404	2,290	2,203	2,134	2,077	2,030
50	4,034	3,183	2,790	2,557	2,400	2,286	2,199	2,130	2,073	2,026
51	4,030	3,179	2,786	2,553	2,397	2,283	2,195	2,126	2,069	2,022
52	4,027	3,175	2,783	2,550	2,393	2,279	2,192	2,122	2,066	2,018
53	4,023	3,172	2,779	2,546	2,389	2,275	2,188	2,119	2,062	2,015
54	4,020	3,168	2,776	2,543	2,386	2,272	2,185	2,115	2,059	2,011
55	4,016	3,165	2,773	2,540	2,383	2,269	2,181	2,112	2,055	2,008
56	4,013	3,162	2,769	2,537	2,380	2,266	2,178	2,109	2,052	2,005
57	4,010	3,159	2,766	2,534	2,377	2,263	2,175	2,106	2,049	2,001
58	4,007	3,156	2,764	2,531	2,374	2,260	2,172	2,103	2,046	1,998
59	4,004	3,153	2,761	2,528	2,371	2,257	2,169	2,100	2,043	1,995
60	4,001	3,150	2,758	2,525	2,368	2,254	2,167	2,097	2,040	1,993
61	3,998	3,148	2,755	2,523	2,366	2,251	2,164	2,094	2,037	1,990
62	3,996	3,145	2,753	2,520	2,363	2,249	2,161	2,092	2,035	1,987
63	3,993	3,143	2,751	2,518	2,361	2,246	2,159	2,089	2,032	1,985
64	3,991	3,140	2,748	2,515	2,358	2,244	2,156	2,087	2,030	1,982
65	3,989	3,138	2,746	2,513	2,356	2,242	2,154	2,084	2,027	1,980
66	3,986	3,136	2,744	2,511	2,354	2,239	2,152	2,082	2,025	1,977
67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080	2,023	1,975
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078	2,021	1,973
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076	2,019	1,971
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074	2,017	1,969

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072	2,015	1,967
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070	2,013	1,965
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068	2,011	1,963
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066	2,009	1,961
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064	2,007	1,959
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063	2,006	1,958
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061	2,004	1,956
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059	2,002	1,954
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058	2,001	1,953
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056	1,999	1,951
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055	1,998	1,950
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053	1,996	1,948
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052	1,995	1,947
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051	1,993	1,945
85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049	1,992	1,944
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048	1,991	1,943
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047	1,989	1,941
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045	1,988	1,940
89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044	1,987	1,939
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043	1,986	1,938
91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200	2,112	2,042	1,984	1,936
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199	2,111	2,041	1,983	1,935
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198	2,110	2,040	1,982	1,934
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197	2,109	2,038	1,981	1,933
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196	2,108	2,037	1,980	1,932

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195	2,106	2,036	1,979	1,931
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194	2,105	2,035	1,978	1,930
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193	2,104	2,034	1,977	1,929
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192	2,103	2,033	1,976	1,928
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191	2,103	2,032	1,975	1,927
101	3,935	3,086	2,695	2,462	2,304	2,190	2,102	2,031	1,974	1,926
102	3,934	3,085	2,694	2,461	2,303	2,189	2,101	2,030	1,973	1,925
103	3,933	3,085	2,693	2,460	2,303	2,188	2,100	2,030	1,972	1,924
104	3,932	3,084	2,692	2,459	2,302	2,187	2,099	2,029	1,971	1,923
105	3,932	3,083	2,691	2,458	2,301	2,186	2,098	2,028	1,970	1,922
106	3,931	3,082	2,690	2,457	2,300	2,185	2,097	2,027	1,969	1,921
107	3,930	3,081	2,689	2,457	2,299	2,184	2,096	2,026	1,969	1,920
108	3,929	3,080	2,689	2,456	2,298	2,184	2,096	2,025	1,968	1,919
109	3,928	3,080	2,688	2,455	2,298	2,183	2,095	2,024	1,967	1,919
110	3,927	3,079	2,687	2,454	2,297	2,182	2,094	2,024	1,966	1,918
111	3,927	3,078	2,686	2,453	2,296	2,181	2,093	2,023	1,965	1,917
112	3,926	3,077	2,686	2,453	2,295	2,181	2,092	2,022	1,964	1,916
113	3,925	3,077	2,685	2,452	2,295	2,180	2,092	2,021	1,964	1,915
114	3,924	3,076	2,684	2,451	2,294	2,179	2,091	2,021	1,963	1,915
115	3,924	3,075	2,683	2,451	2,293	2,178	2,090	2,020	1,962	1,914
116	3,923	3,074	2,683	2,450	2,293	2,178	2,089	2,019	1,962	1,913
117	3,922	3,074	2,682	2,449	2,292	2,177	2,089	2,018	1,961	1,913
118	3,921	3,073	2,681	2,449	2,291	2,176	2,088	2,018	1,960	1,912
119	3,921	3,072	2,681	2,448	2,290	2,176	2,087	2,017	1,959	1,911
120	3,920	3,072	2,680	2,447	2,290	2,175	2,087	2,016	1,959	1,910

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
121	3,919	3,071	2,680	2,447	2,289	2,174	2,086	2,016	1,958	1,910
122	3,919	3,071	2,679	2,446	2,289	2,174	2,085	2,015	1,957	1,909
123	3,918	3,070	2,678	2,445	2,288	2,173	2,085	2,014	1,957	1,908
124	3,918	3,069	2,678	2,445	2,287	2,173	2,084	2,014	1,956	1,908
125	3,917	3,069	2,677	2,444	2,287	2,172	2,084	2,013	1,956	1,907
126	3,916	3,068	2,677	2,444	2,286	2,171	2,083	2,013	1,955	1,907
127	3,916	3,068	2,676	2,443	2,286	2,171	2,082	2,012	1,954	1,906
128	3,915	3,067	2,675	2,442	2,285	2,170	2,082	2,011	1,954	1,905
129	3,915	3,066	2,675	2,442	2,284	2,170	2,081	2,011	1,953	1,905
130	3,914	3,066	2,674	2,441	2,284	2,169	2,081	2,010	1,953	1,904
131	3,913	3,065	2,674	2,441	2,283	2,168	2,080	2,010	1,952	1,904
132	3,913	3,065	2,673	2,440	2,283	2,168	2,080	2,009	1,951	1,903
133	3,912	3,064	2,673	2,440	2,282	2,167	2,079	2,009	1,951	1,903
134	3,912	3,064	2,672	2,439	2,282	2,167	2,079	2,008	1,950	1,902
135	3,911	3,063	2,672	2,439	2,281	2,166	2,078	2,008	1,950	1,901
136	3,911	3,063	2,671	2,438	2,281	2,166	2,078	2,007	1,949	1,901
137	3,910	3,062	2,671	2,438	2,280	2,165	2,077	2,007	1,949	1,900
138	3,910	3,062	2,670	2,437	2,280	2,165	2,077	2,006	1,948	1,900
139	3,909	3,061	2,670	2,437	2,279	2,164	2,076	2,006	1,948	1,899
140	3,909	3,061	2,669	2,436	2,279	2,164	2,076	2,005	1,947	1,899
141	3,908	3,060	2,669	2,436	2,278	2,163	2,075	2,005	1,947	1,898
142	3,908	3,060	2,668	2,435	2,278	2,163	2,075	2,004	1,946	1,898
143	3,907	3,059	2,668	2,435	2,277	2,163	2,074	2,004	1,946	1,897
144	3,907	3,059	2,667	2,435	2,277	2,162	2,074	2,003	1,945	1,897
145	3,906	3,058	2,667	2,434	2,277	2,162	2,073	2,003	1,945	1,897

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
146	3,906	3,058	2,667	2,434	2,276	2,161	2,073	2,002	1,945	1,896
147	3,905	3,058	2,666	2,433	2,276	2,161	2,072	2,002	1,944	1,896
148	3,905	3,057	2,666	2,433	2,275	2,160	2,072	2,001	1,944	1,895
149	3,905	3,057	2,665	2,432	2,275	2,160	2,072	2,001	1,943	1,895
150	3,904	3,056	2,665	2,432	2,274	2,160	2,071	2,001	1,943	1,894
151	3,904	3,056	2,665	2,432	2,274	2,159	2,071	2,000	1,942	1,894
152	3,903	3,056	2,664	2,431	2,274	2,159	2,070	2,000	1,942	1,893
153	3,903	3,055	2,664	2,431	2,273	2,158	2,070	1,999	1,942	1,893
154	3,903	3,055	2,663	2,430	2,273	2,158	2,070	1,999	1,941	1,893
155	3,902	3,054	2,663	2,430	2,273	2,158	2,069	1,999	1,941	1,892
156	3,902	3,054	2,663	2,430	2,272	2,157	2,069	1,998	1,940	1,892
157	3,901	3,054	2,662	2,429	2,272	2,157	2,068	1,998	1,940	1,891
158	3,901	3,053	2,662	2,429	2,271	2,156	2,068	1,997	1,940	1,891
159	3,901	3,053	2,661	2,429	2,271	2,156	2,068	1,997	1,939	1,891
160	3,900	3,053	2,661	2,428	2,271	2,156	2,067	1,997	1,939	1,890
161	3,900	3,052	2,661	2,428	2,270	2,155	2,067	1,996	1,938	1,890
162	3,900	3,052	2,660	2,427	2,270	2,155	2,067	1,996	1,938	1,890
163	3,899	3,051	2,660	2,427	2,270	2,155	2,066	1,996	1,938	1,889
164	3,899	3,051	2,660	2,427	2,269	2,154	2,066	1,995	1,937	1,889
165	3,898	3,051	2,659	2,426	2,269	2,154	2,065	1,995	1,937	1,888
166	3,898	3,050	2,659	2,426	2,269	2,154	2,065	1,995	1,937	1,888
167	3,898	3,050	2,659	2,426	2,268	2,153	2,065	1,994	1,936	1,888
168	3,897	3,050	2,658	2,425	2,268	2,153	2,064	1,994	1,936	1,887
169	3,897	3,049	2,658	2,425	2,268	2,153	2,064	1,994	1,936	1,887
170	3,897	3,049	2,658	2,425	2,267	2,152	2,064	1,993	1,935	1,887

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
171	3,896	3,049	2,657	2,425	2,267	2,152	2,063	1,993	1,935	1,886
172	3,896	3,049	2,657	2,424	2,267	2,152	2,063	1,993	1,935	1,886
173	3,896	3,048	2,657	2,424	2,266	2,151	2,063	1,992	1,934	1,886
174	3,895	3,048	2,657	2,424	2,266	2,151	2,063	1,992	1,934	1,885
175	3,895	3,048	2,656	2,423	2,266	2,151	2,062	1,992	1,934	1,885
176	3,895	3,047	2,656	2,423	2,265	2,150	2,062	1,991	1,933	1,885
177	3,895	3,047	2,656	2,423	2,265	2,150	2,062	1,991	1,933	1,885
178	3,894	3,047	2,655	2,422	2,265	2,150	2,061	1,991	1,933	1,884
179	3,894	3,046	2,655	2,422	2,265	2,150	2,061	1,990	1,932	1,884
180	3,894	3,046	2,655	2,422	2,264	2,149	2,061	1,990	1,932	1,884
181	3,893	3,046	2,655	2,422	2,264	2,149	2,060	1,990	1,932	1,883
182	3,893	3,046	2,654	2,421	2,264	2,149	2,060	1,990	1,932	1,883
183	3,893	3,045	2,654	2,421	2,263	2,148	2,060	1,989	1,931	1,883
184	3,892	3,045	2,654	2,421	2,263	2,148	2,060	1,989	1,931	1,882
185	3,892	3,045	2,653	2,420	2,263	2,148	2,059	1,989	1,931	1,882
186	3,892	3,045	2,653	2,420	2,263	2,148	2,059	1,988	1,931	1,882
187	3,892	3,044	2,653	2,420	2,262	2,147	2,059	1,988	1,930	1,882
188	3,891	3,044	2,653	2,420	2,262	2,147	2,059	1,988	1,930	1,881
189	3,891	3,044	2,652	2,419	2,262	2,147	2,058	1,988	1,930	1,881
190	3,891	3,043	2,652	2,419	2,262	2,147	2,058	1,987	1,929	1,881
191	3,891	3,043	2,652	2,419	2,261	2,146	2,058	1,987	1,929	1,881
192	3,890	3,043	2,652	2,419	2,261	2,146	2,058	1,987	1,929	1,880
193	3,890	3,043	2,651	2,418	2,261	2,146	2,057	1,987	1,929	1,880
194	3,890	3,042	2,651	2,418	2,261	2,146	2,057	1,986	1,928	1,880
195	3,890	3,042	2,651	2,418	2,260	2,145	2,057	1,986	1,928	1,880

Critical Values for the F-Distribution Level of Significance $\alpha = 0,05$										
196	3,889	3,042	2,651	2,418	2,260	2,145	2,057	1,986	1,928	1,879
197	3,889	3,042	2,650	2,417	2,260	2,145	2,056	1,986	1,928	1,879
198	3,889	3,042	2,650	2,417	2,260	2,145	2,056	1,985	1,927	1,879
199	3,889	3,041	2,650	2,417	2,259	2,144	2,056	1,985	1,927	1,879
200	3,888	3,041	2,650	2,417	2,259	2,144	2,056	1,985	1,927	1,878

Lampiran 6 *Output SPSS*

Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X1
X1.1	Pearson Correlation	,814
X1.2	Pearson Correlation	,756
X1.3	Pearson Correlation	,838
X1.4	Pearson Correlation	,860
X1.5	Pearson Correlation	,874
X1.6	Pearson Correlation	,835
X1.7	Pearson Correlation	,742
X1	Pearson Correlation	1
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,914	7

Correlations

		X2
X2.1	Pearson Correlation	,812
X2.2	Pearson Correlation	,822
X2.3	Pearson Correlation	,851
X2.4	Pearson Correlation	,854
X2.5	Pearson Correlation	,872
X2	Pearson Correlation	1
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,896	5

Correlations

		X3
X3.1	Pearson Correlation	,718
X3.2	Pearson Correlation	,799
X3.3	Pearson Correlation	,791
X3.4	Pearson Correlation	,690
X3.5	Pearson Correlation	,722
X3.6	Pearson Correlation	,745
X3.7	Pearson Correlation	,694
X3.8	Pearson Correlation	,674
X3.9	Pearson Correlation	,682
X3.10	Pearson Correlation	,666
X3.11	Pearson Correlation	,623
X3	Pearson Correlation	1
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,900	11

Correlations

		X4
X4.1	Pearson Correlation	,812
X4.2	Pearson Correlation	,767
X4.3	Pearson Correlation	,768
X4.4	Pearson Correlation	,753
X4.5	Pearson Correlation	,827
X4.6	Pearson Correlation	,664
X4.7	Pearson Correlation	,788
X4.8	Pearson Correlation	,823
X4	Pearson Correlation	1
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,901	8

Correlations

		Y
Y.1	Pearson Correlation	,539
Y.2	Pearson Correlation	,758
Y.3	Pearson Correlation	,815
Y.4	Pearson Correlation	,870
Y.5	Pearson Correlation	,824
Y.6	Pearson Correlation	,696
Y.7	Pearson Correlation	,794
Y.8	Pearson Correlation	,586
Y.9	Pearson Correlation	,600
Y.10	Pearson Correlation	,631
Y	Pearson Correlation	1
	N	90

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,891	10

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,59772912
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,047
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,198 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

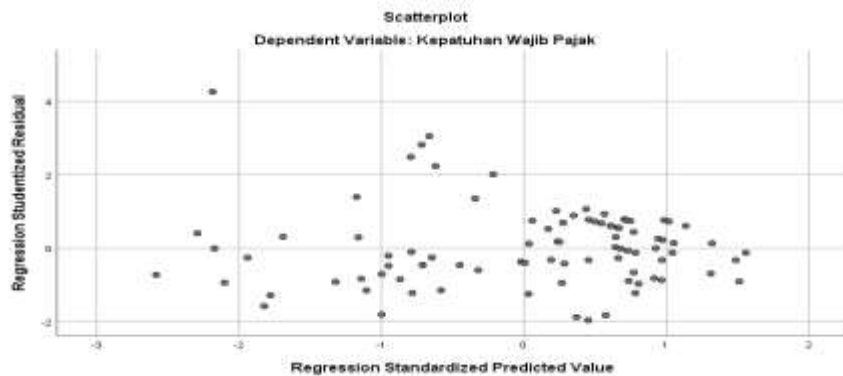
2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpakan	,885	1,130
	Kesadaran Wajib Pajak	,885	1,130
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,980	1,020
	Pemeriksaan Pajak	,980	1,020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Uji Heteroskedastisitas



Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,127	2,866		3,533	,001
	Pengetahuan Perpakan	-,061	,056	-,121	-1,098	,275
	Kesadaran Wajib Pajak	-,123	,072	-,187	-1,696	,094
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	-,028	,037	-,078	-,743	,460
	Pemeriksaan Pajak	-,048	,047	-,107	-1,022	,310

a. Dependent Variable: ABS

4. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,732 ^a	,536	,514	3,68141

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian Hipotesis

1. Uji t dan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,888	4,738		,187	,852
	Pengetahuan Perpajakan	,555	,092	,472	6,008	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,452	,120	,296	3,774	,000
	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	,181	,062	,218	2,927	,004
	Pemeriksaan Pajak	,226	,078	,217	2,913	,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1329,970	4	332,493	24,533	,000 ^b
	Residual	1151,985	85	13,553		
	Total	2481,956	89			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan